

**IMPLEMENTASI GERAKAN SWASEMBADA GIZI DALAM
PENURUNAN *PREVALENSI STUNTING* DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Tesis

**Oleh:
BURHIBANI
NPM 2126021011**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI GERAKAN SWASEMBADA GIZI DALAM
PENURUNAN *PREVALENSI STUNTING* DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

**Oleh:
BURHIBANI
NPM 2126021011**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI GERAKAN SWASEMBADA GIZI DALAM
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

Oleh

BURHIBANI

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan fondasi Visi Indonesia Emas 2045, dengan penanganan stunting sebagai isu krusial karena dampaknya terhadap kesehatan, produktivitas ekonomi, dan mutu SDM. Stunting, masalah gizi kronis yang menghambat perkembangan neurokognitif anak, menjadi perhatian serius di Indonesia, dengan target penurunan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024. Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu lokus prioritas, menginisiasi Gerakan Swasembada Gizi (GSG) melalui Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2020, bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri dan berkelanjutan, dengan target stunting $\leq 5\%$ pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi GSG dalam upaya penurunan stunting, menggunakan Konsep Implementasi Kebijakan George Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasilnya menunjukkan penurunan prevalensi stunting yang signifikan di Lampung Selatan, dari 43% (2013) menjadi 10,30% (2023), melampaui target nasional. Keberhasilan ini didukung oleh komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat; sumber daya yang beragam termasuk alokasi anggaran APBN, APBD, Dana Desa, serta ketersediaan kader terlatih dan fasilitas berbasis komunitas (Posyandu, Taman Gizi Desa); disposisi positif dari pimpinan daerah, pelaksana, dan masyarakat yang ditunjukkan melalui komitmen dan partisipasi aktif; serta struktur birokrasi yang terkoordinasi melalui tim pengendali multi-tingkat dan regulasi yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen politik yang kuat, pembelajaran adaptif, dan pelibatan multi-*stakeholder* merupakan faktor kunci keberhasilan Gerakan Swasembada Gizi.

Kata Kunci: Stunting, Gerakan Swasembada Gizi, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

The Implementation of the Self-Sufficiency Nutrition Movement for Stunting Prevalence Reduction in Lampung Selatan Regency

By

BURHIBANI

The development of quality human resources (HR) is the cornerstone of Indonesia's Golden Vision 2045. Addressing stunting is a crucial issue due to its impact on health, economic productivity, and HR quality. Stunting, a chronic nutritional problem that hinders children's neurocognitive development, is a serious concern in Indonesia, with a target of reducing its prevalence to 14% by 2024. Lampung Selatan Regency, as a priority locus, initiated the Self-Sufficiency Nutrition Movement (Gerakan Swasembada Gizi - GSG) through Regent's Instruction No. 2 of 2020. This movement aims to improve the quality of local government services and community participation in independent and sustainable nutrition fulfillment, targeting a stunting prevalence of $\leq 5\%$ by 2024. This study aims to describe the implementation of GSG in reducing stunting, utilizing George Edward III's Policy Implementation Concept, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show a significant reduction in stunting prevalence in Lampung Selatan, from 43% (2013) to 10.30% (2023), surpassing the national target. This success was supported by effective communication among stakeholders, which increased community awareness and participation; diverse resources, including budget allocations from the APBN (State Budget), APBD (Regional Budget), and Village Funds, as well as the availability of trained cadres and community-based facilities (Posyandu, Village Nutrition Parks); positive disposition from regional leaders, implementers, and the community, demonstrated through high commitment and active participation; and a coordinated bureaucratic structure through multi-level control teams and clear regulations. This research concludes that strong political commitment, adaptive learning, and multi-stakeholder involvement are key factors in the success of the Self-Sufficiency Nutrition Movement.

Keywords: *Stunting, Self-Sufficiency Nutrition Movement, Policy Implementation.*

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI GERAKAN SWASEMBADA
GIZI DALAM PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Burhibani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021011**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos. M.I.P.
NIP. 197804302008121001

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 196902191994032001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 196902191994032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**

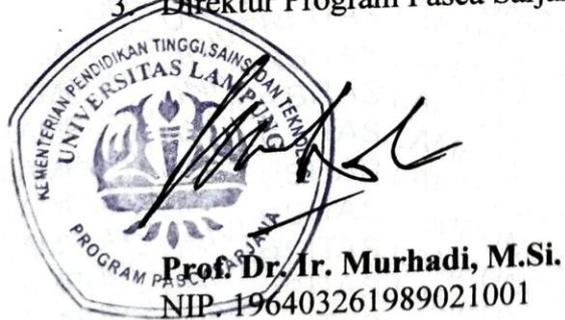
Sekretaris : **Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 17 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Implementasi Gerakan Swasembada Gizi Dalam Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Selatan” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Burhibani
NPM. 2126021011

RIWAYAT HIDUP



Burhibani, S.IP, lahir di Muara Enim pada 14 September 1983, kini telah menyelesaikan studi magisternya di bidang Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Penulis menikah dengan Diana Puspita Dewi, S.Sos, dan dikaruniai dua orang anak. Penulis menempuh pendidikan formal di SMU Plus Negeri 17 Palembang, lulus pada tahun 2000. Kemudian, penulis melanjutkan studi S1 Ilmu Pemerintahan di FISIP UNDIP Semarang melalui jalur PSSB (Program Seleksi Siswa Berpotensi) dan berhasil lulus pada tahun 2007. Selama masa kuliah S1, penulis berkesempatan menerima beasiswa Pertamina selama dua tahun.

Sebelum berwiraswasta, penulis memiliki pengalaman profesional yang beragam. Penulis pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Lampung. Selain itu, penulis juga memiliki rekam jejak yang kuat di industri keuangan, termasuk sebagai Kepala Cabang Lampung di PT Garuda Nusantara Capital, Kepala Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia di Lampung, dan Pialang Saham di PT BNI *Securities* Palembang serta PT Mega Capital Indonesia, bahkan pernah bekerja di Konsultan Politik Indonesia *Strategy* sebagai *Liason Officer* Ketika masih kuliah. Di bidang sosial dan organisasi, penulis aktif menjabat sebagai Sekretaris DPD IKA Undip Lampung sejak 2017. Penulis juga pernah menjadi Anggota Forkom PUSPA Provinsi Lampung dan Ketua Kompartemen Jasa Keuangan dan Pasar Modal, BPD HIPMI Lampung (2010-2013). Pengalaman kepemimpinan penulis sudah terasah sejak mahasiswa dengan aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, di antaranya sebagai Wakil Sekretaris KNPI Kota Semarang, Ketua Komisi Senat Mahasiswa Perguruan

Tinggi Undip, HMI Undip, dan Ketua Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan di Semarang. Penulis juga sangat aktif dalam mengikuti berbagai pelatihan untuk terus mengembangkan diri. Pelatihan yang pernah diikuti mencakup bidang industri keuangan dan pasar modal, Keuangan Syariah, Merger, Akuisisi & *Tender Offer*, hingga topik Kesehatan Reproduksi, Kebencanaan, *HIV*, dan *Gender*. Dalam pengembangan pribadi, penulis telah mengikuti pelatihan seperti *Agent of Change*, *Becoming Effective Person*, *ESQ Character Building*, dan *Result Based Management (RBM)* dari Lembaga Ternama.

MOTTO

"Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru"

(Ki Hajar Dewantara)

“Jadikan langit sebagai pembatas, Yakin Usaha Sampai”

(penulis)

PERSEMBAHAN**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Dengan mengucap rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang kusayang dan menyayangiku.
Muhammad Ilah dan Siti Murni (almh), kedua orangtuaku,
Isteriku tercinta, Diana Puspita Dewi,
Kedua anaku, Alina Naura Syifa Hibani dan Qainan Fillah Hibani,
Kakak-kakak dan adikku, dan semua pihak yang mungkin dapat mengambil manfaat dari karya kecil ini.

PRAKATA

Alhamdulillahirrobbil 'Alamiin. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik bagi umat pengikutnya.

Setelah melalui berbagai dinamika yang panjang tesis yang berjudul “Implementasi Gerakan Swasembada Gizi Dalam Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Selatan” dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Atas selesainya penulisan Tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Dosen Penguji Utama Tesis ini, yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sejak proses.
5. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D., yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. selaku Dosen pembimbing akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dukungan dan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas motivasi, arahan dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Pembahas sekaligus Penguji yang telah banyak memberikan perspektif kritis serta motivasi, arahan, dukungan dan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini
9. Seluruh Dosen dan Pejabat Struktural di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, atas ilmu, kebersamaan dan kekeluargaan yang membuat proses pendidikan yang penulis tempuh menjadi lebih ringan di tengah berbagai tantangan yang ada.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Magister Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas bantuan, pelayanan dan penyediaan fasilitas yang sangat membantu penulis menyelesaikan tugas-tugas diperkuliahan.
11. Ibu Rika Wati, S.STP., MM, Kepala Dinas Dalduk KB Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Andi Nurizal, S.E., M.M., Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda, Bapak Basuki Didik Setiawan, SKM., M.M, Kepala Bidang bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, para staf, kader dan pihak lainnya.
12. Seluruh Informan yang telah membantu dengan sukarela dalam menjawab pertanyaan ataupun memberikan keterangan dan pendapat yang sangat penting dalam penelitian untuk tesis ini.
13. Semua teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 dari semua konsentrasi: POLOTDA, MP, dan TKP atas kebersamaan dan motivasi untuk saling menguatkan menyelesaikan rangkaian tugas-tugas perkuliahan.
14. Rekan-rekan yang telah menjadi *support system* dan kebersamai hingga akhir: Pak Sasmika, mbak Shofarani, mas Gede Ari, mas Aziz, bang Vito dan

staff MIP yang paling semangat mbak Fitri, Bang Ariska WN dan mbak Arie Fitria atas semua dukungan dan kebersamaannya selama ini.

15. *Last but not least*, keluarga penulis yang selalu menumbuhkan semangat dan harapan kepada penulis: Ayah; Almarhum Ibu, Istriku tercinta, Diana Puspita Dewi dan anak-anakku: Alina Naura Syifa Hibani, dan Qainan Fillah Hibani, Kakak dan Adik Penulis, Ipar, Keponakan dan semua keluarga besar. Do'a, harapan, kebersamaan dan perhatian memberikan motivasi yang membuat penulis tidak menyerah untuk menyelesaikan studi.

Terima kasih tak terhingga atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada semua yang telah penulis sebutkan di atas, dan juga semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses kuliah dan penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-per satu. Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Burhibani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
BURHIBANI.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PRAKATA	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Secara Akademis.....	16
1.4.2 Secara Praktis	16
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan	17
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2.1.2 Implementasi Kebijakan	21
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan.....	23

2.2 Konsep Gerakan.....	37
2.2.1 Pengertian Gerakan.....	37
2.2.2 Swasembada sebagai Gerakan.....	41
2.3 Pengertian <i>Stunting</i> dan <i>Prevalensi Stunting</i>	43
2.3.1 Pengertian <i>Stunting</i>	43
2.3.2 <i>Prevalensi Stunting</i>	45
2.4 Kerangka Pikir	46
III. METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Tipe Penelitian	49
3.2 Fokus Penelitian.....	49
3.3 Jenis Data.....	50
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
3.5 Informan	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data	53
3.6.1 Dokumentasi	53
3.6.2 Wawancara.....	53
3.6.3 Observasi.....	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
3.7.1 Reduksi Data.....	54
3.7.2 Data Display	55
3.7.3 Teknik Keabsahan Data	55
3.7.4 Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Profil Kabupaten Lampung Selatan.....	57
4.1.1 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat.....	58
4.2 Implementasi Gerakan Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan.....	64
4.2.1 Sejarah, Dasar Hukum, dan Visi Gerakan Swasembada Gizi.....	64
4.2.2 Tujuan Strategis dan Target Penurunan Stunting dalam RPJMD ..	67
4.2.3 Desa Lokus Intervensi Penurunan Stunting.....	72
4.2.4 Desa Pilot Project Penanganan Stunting.....	74
4.2.5 Strategi dan Sasaran Intervensi Stunting	75
4.2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Lintas Sektor Dalam Gerakan Swasembada Gizi	80
4.2.7 Bentuk Inovasi Program Gerakan Swasembada Gizi.....	83
4.2.8 Anggaran Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan.....	97

4.2.9 Pihak-pihak yang Terlibat dan Peran Masing-masing (Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Akademisi).....	99
4.3 Implementasi Dimensi Komunikasi	101
4.4 Implementasi Dimensi Sumber Daya	107
4.5 Implementasi Dimensi Disposisi	113
4.6 Implementasi Dimensi Struktur Birokrasi	117
4.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi.....	120
4.7.1 Faktor Pendukung	120
4.7.2 Faktor Penghambat	120
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	122
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Prevalensi, Jumlah Balita Stunting dan Kemiskinan di 100 Kabupaten/Kota Prioritas Intervensi (Provinsi Lampung)	9
Tabel 2. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung (dalam %)	12
Tabel 3. Informan Penelitian	46
Tabel 4. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	54
Tabel 5. Regulasi Terkait Stunting di Kabupaten Lampung Selatan.....	59
Tabel 6. Tren Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Selatan (2013-2023)	62
Tabel 7. Jumlah desa lokus <i>stunting</i>	65
Tabel 8. Nama desa yang menjadi lokus stunting	66
Tabel 9. Desa Percontohan Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan	67
Tabel 10. Komponen Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Gerakan Swasembada Gizi	72
Tabel 11. Pesan Kunci berdasarkan kelompok sasaran	76
Tabel 12. Alokasi Anggaran Penanganan Stunting	91
Tabel 13. Peran Aktor Kunci dalam GSG	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Prevalensi Global Stunting, Wasting, dan Overweight pada Anak di bawah 5 Tahun	2
Gambar 2. Situasi Prevalensi Stunting Anak Indonesia.....	2
Gambar 3. Prevalensi Stunting Nasional 2018-2022	3
Gambar 4. Model Kerangka Analisis Implementasi Mazmanian & Sabatier.....	26
Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan dari van Meter dan van Horn.....	31
Gambar 6. Model Implementasi menurut Edward III	33
Gambar 7. Alur Penyebab Masalah stunting.....	39
Gambar 8. Bagan Kerangka Pikir	42
Gambar 9. Bisnis Proses Swasembada Gizi.....	64
Gambar 10. Alokasi Anggaran Stunting 3 tahun terakhir.....	91

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
ANC	: Ante Natal Care
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASI	: Air Susu Ibu
Bapanas	: Badan Pangan Nasional
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BCC	: Behaviour Change Communication
BGN	: Badan Gizi Nasional
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKB	: Bina Keluarga Balita
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: Corporate Social Responsibility
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DD	: Dana Desa
DIF	: Daftar Isian Formulir
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
GMBI	: Gerakan Masyarakat Budidaya Ikan

GSG	: Gerakan Swasembada Gizi
HPK	: 1000 Hari Pertama Kehidupan
IEC	: Informasi, Edukasi, dan Komunikasi
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
K3	: Kolam, Kandang, Kebun
KB	: Keluarga Berencana
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDT	: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
MPASI	: Makanan Pendamping ASI
NGO	: Non-Governmental Organization
ODF	: Open Defecation Free (Bebas Buang Air Besar Sembarangan)
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P2KP	: Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
P3S	: Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PKH	: Program Keluarga Harapan
PMBA	: Pemberian Makan Bayi dan Anak

PMK	: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
RAPG	: Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTLH	: Rumah Tidak Layak Hun
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKI	: Survei Kesehatan Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SSGBI	: Survei Status Gizi Balita Indonesia
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Stranas	: Strategi Nasional
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TBC	: Tuberkulosis
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPK	: Tim Pendamping Keluarga
TPPS	: Tim Percepatan Penurunan Stunting
TTD	: Tablet Tambah Darah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
WHO	: World Health Organization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menciptakan masyarakat yang cerdas, menjunjung nilai pluralisme, kaya budaya, memiliki keimanan yang kuat, dan berpegang pada etika. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai permasalahan dalam penyiapan SDM yang unggul menjadi sangat penting untuk mencapai visi tersebut, mengurangi kesenjangan, serta menduduki posisi setara dengan kekuatan daya saing di kancah internasional. Kualitas SDM sendiri merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai tolok ukur dengan mengadaptasi tiga dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan yang memadai, serta standar hidup yang layak. Menariknya, indikator-indikator dalam ketiga dimensi IPM ini berkaitan erat dengan permasalahan stunting, baik sebagai salah satu penyebab maupun sebagai dampaknya.

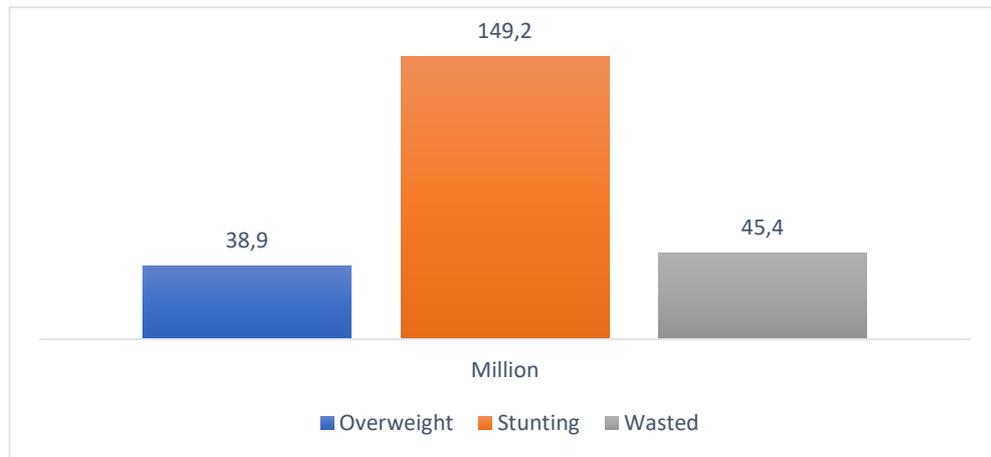
Selain itu, pendalaman keterkaitan antara indikator IPM dan stunting membuka peluang untuk merumuskan strategi terpadu yang tidak hanya fokus pada peningkatan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas gizi dan lingkungan hidup yang mendukung pertumbuhan optimal sejak usia dini. Ini merupakan langkah strategis dalam upaya mencapai kesejahteraan yang merata dan daya saing internasional yang kuat di masa depan.

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, persoalan stunting, yang merupakan bagian dari fenomena gizi ganda, menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap kesehatan serta produktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun berkelanjutan. Pada sisi kesehatan, *stunting* pada masa awal kehidupan dapat menghambat perkembangan otak anak. Kondisi ini dapat

menyebabkan kemampuan berpikir anak tidak berkembang optimal. Akibatnya, kemampuan belajar anak dalam jangka panjang menjadi lebih rendah, yang berujung pada penurunan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, *stunting* juga meningkatkan risiko penyakit di usia dewasa, seperti penyakit jantung dan diabetes. Kondisi tersebut semakin memperberat tantangan di bidang kesehatan dan ekonomi, sekaligus menurunkan mutu kehidupan. Secara ekonomi, *stunting* berdampak tidak hanya bagi individu, tetapi juga mempengaruhi perekonomian nasional. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akibat *stunting* menghambat inovasi, penggunaan teknologi, dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan menyeluruh dan terpadu untuk mengatasi *stunting*, yang mencakup aspek gizi, kesehatan, kebersihan, dan pendidikan, menjadi sangat penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Indonesia tengah berusaha mengatasi masalah *stunting*, sebuah permasalahan gizi kronis yang berdampak pada fungsi kognitif, seperti penurunan tingkat kecerdasan, sehingga memengaruhi mutu sumber daya manusia. Dampak *stunting* cukup serius, di mana secara jangka pendek berkontribusi pada tingginya angka morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita, secara jangka menengah memengaruhi intelektualitas dan kemampuan kognitif, serta secara jangka panjang menurunkan kualitas SDM dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif di usia dewasa (Aryastami, 2017). *Stunting* bukan hanya masalah nasional, tetapi juga global, dengan jutaan anak di seluruh dunia terkena dampaknya. Di Indonesia sendiri, jumlah anak *stunting* cukup signifikan.



Gambar 1. Prevalensi Global *Stunting*, *Wasting*, dan *Overweight* pada Anak di bawah 5 Tahun

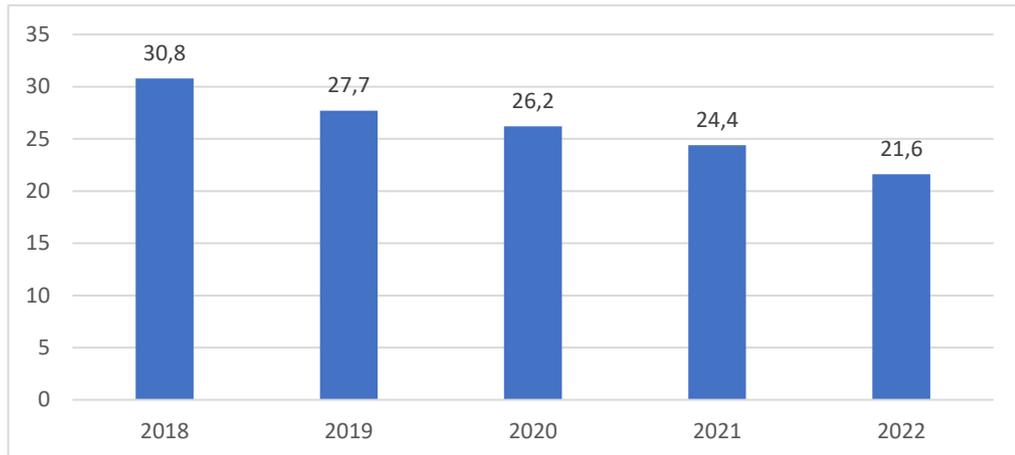
Sumber: diolah peneliti dari data WHO (2021)

Gambar 1 menggambarkan angka gizi buruk anak dibawah 5 tahun di dunia yang terdiri dari kategori *overweight* (terlalu berat untuk tinggi), *stunting* (terlalu pendek untuk usia) dan *wasting* (terlalu kurus untuk tinggi). Pada gambar diatas terlihat bahwa sebanyak 5,7% atau 38,9 juta anak di dunia mengalami kelebihan berat badan, 22% atau 149,2 juta jiwa anak mengalami stunting dan 6,7% atau 45,4 juta jiwa mengalami wasting (Rahman et al, 2023).



Gambar 2. Situasi Prevalensi Stunting Anak Indonesia

Sumber: Riskesdas 2020



Grafik 1. Prevalensi Stunting Nasional 2018-2022

Sumber: diolah oleh peneliti dari data TPPS

Berdasarkan Gambar 2 diatas, telah menunjukkan adanya tren penurunan angka prevalensi stunting pada 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022. Dari 30.8% pada tahun 2018 menjadi 21.6% pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan yang konsisten, target nasional untuk mencapai 14% pada tahun 2024 masih memerlukan upaya lebih lanjut.

Laporan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ada empat faktor utama yang memicu terjadinya stunting. Pertama, praktik pengasuhan yang belum optimal, yang timbul karena orang tua kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan gizi selama kehamilan dan pasca kelahiran. Kedua, kualitas pelayanan antenatal dan pascapersalinan yang belum memadai. Ketiga, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, yang disebabkan oleh harga makanan sehat yang relatif tinggi. Keempat, sanitasi dan akses terhadap air bersih yang tidak mencukupi, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi berulang yang berdampak negatif pada pertumbuhan anak.

Percepatan penurunan *stunting* pada balita merupakan program prioritas Pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah mengurangi prevalensi stunting hingga mencapai 14%. Penurunan

prevalensi stunting di Indonesia telah dijadikan agenda prioritas nasional, seperti yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJPN 2005-2025. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi angka stunting hingga mencapai 14% pada tahun 2024.

Lebih lanjut, kerangka hukum dan kelembagaan untuk mempercepat penurunan stunting diperkuat melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan tersebut secara eksplisit menugaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator pelaksana di lapangan.

Strategi nasional percepatan penurunan stunting diwujudkan melalui implementasi 5 (lima) pilar utama:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, Melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.
2. Penguatan kapasitas institusi, Termasuk peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pendidikan pengasuhan stimulasi penanganan stunting.
3. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku, Guna menumbuhkan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai peran penting asupan gizi yang seimbang dan praktik sanitasi yang baik.
4. Pemenuhan standar pelayanan, Misalnya, pengawasan pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu.
5. Pelaksanaan kelas Bina Keluarga Balita (BKB), Khususnya mengenai pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pemerintah Indonesia menempatkan pencegahan stunting sebagai prioritas utama dalam memastikan pertumbuhan anak-anak yang optimal, baik dari aspek fisik, emosional, maupun sosial, sehingga mereka siap menghadapi proses pembelajaran, berinovasi, dan bersaing secara global. Upaya ini merupakan bagian integral dari Program Strategis Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

untuk periode tertentu, salah satu sasaran di bidang kesehatan adalah penurunan angka stunting pada anak di bawah usia dua tahun.

Mengingat dampak *stunting* yang luas dan serius, pencegahan menjadi sangat penting. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai sektor untuk mengatasi masalah ini, sehingga generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan berdaya saing. *Stunting* menghambat terbentuknya generasi unggul dan berkualitas yang nantinya akan menjadi tulang punggung pembangunan negara. Oleh karena itu, penanggulangan stunting menjadi aspek yang sangat penting dalam merealisasikan visi "Indonesia Emas 2045". Upaya mengatasi masalah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan ke depannya.

Stunting pada anak merupakan hambatan besar dalam perkembangan manusia dan mempengaruhi sekitar 162 juta anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia. Secara definisi, stunting adalah kondisi di mana tinggi badan balita berada di bawah standar untuk usianya. Kondisi ini diukur dengan cara membandingkan panjang atau tinggi badan anak dengan rata-rata pertumbuhan WHO, dan anak dikategorikan sebagai stunting jika pengukuran tersebut berada lebih dari dua standar deviasi di bawah rata-rata. Dampak yang ditimbulkan bersifat jangka pendek dan jangka panjang, meliputi peningkatan morbiditas dan mortalitas, gangguan perkembangan, serta peningkatan risiko terkena penyakit menular dan tidak menular, obesitas, penurunan oksidasi lemak, pengeluaran energi yang menurun, resistensi insulin, dan risiko tinggi diabetes, hipertensi, dislipidemia, serta penurunan kinerja dan kemampuan reproduksi pada ibu di kemudian hari.

Indonesia merupakan negara ketiga dengan *prevalensi stunting* tertinggi di Asia Tenggara dengan rata-rata *prevalensi stunting* pada balita di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai proyek strategis prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat dengan target mengurangi prevalensi stunting hingga mencapai 14% pada tahun 2024.

Dalam upaya menangani stunting secara komprehensif, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh sasaran prioritas program—yakni Rumah Tangga 1.000 HPK—dapat mengakses serta memanfaatkan layanan gizi prioritas secara utuh dan optimal. Layanan ini mencakup pendekatan yang menargetkan kedua aspek: penyebab langsung melalui intervensi gizi spesifik, dan penyebab tidak langsung melalui intervensi gizi sensitif terhadap permasalahan stunting. Untuk menjamin akses layanan yang lengkap, diperlukan pula dukungan tambahan berupa faktor pendukung seperti komitmen politik yang kuat dan kebijakan yang mendukung implementasi program lintas sektor secara berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, penanggulangan masalah ini harus dilaksanakan secara menyeluruh, komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai sektor. Upaya ini diwujudkan melalui pendampingan intensif bagi keluarga yang berisiko melahirkan bayi dengan risiko stunting. Pendampingan ini sebaiknya dimulai sejak masa remaja dan calon pengantin, berlanjut pada masa kehamilan dan pascapersalinan, dan tetap diberikan hingga anak mencapai usia 5 tahun. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi—baik yang bersifat sensitif maupun spesifik—tersebar secara optimal kepada penerima manfaat dan akhirnya menghasilkan penurunan prevalensi stunting.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Lampung. Wilayahnya seluas 2.007,01 km² dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.057.664 jiwa pada tahun 2021, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 527 jiwa per km². Dengan profil tersebut, banyak tantangan terkait demografi yang perlu ditangani Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya mengenai tingkat *stunting*. Pada tahun 2013, prevalensi *stunting* di Kabupaten Lampung Selatan pernah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 43,01 persen. Hal ini menjadikannya salah satu kabupaten prioritas dalam penanggulangan stunting dan termasuk dalam 100 kabupaten/kota awal yang ditargetkan untuk intervensi stunting. Pemilihan ke-100 wilayah tersebut didasarkan pada kriteria jumlah dan prevalensi balita yang mengalami stunting,

dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi, baik di tingkat desa maupun kota.

Kabupaten Lampung Selatan juga tercatat sebagai salah satu lokus prioritas intervensi *stunting* nasional, di mana penetapan tersebut mempertimbangkan indikator jumlah balita yang *stunting*, tingkat prevalensi *stunting*, dan tingkat kemiskinan. Melihat indikator kemiskinan, Kabupaten Lampung Selatan menduduki peringkat tertinggi, sehingga menjadi fokus utama baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya pengurangan kasus *stunting*.

Sejak tahun 2021, Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten fokus penanganan *stunting* di Indonesia melalui Surat Keputusan Kepala Bappenas Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021. Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengupayakan pelaksanaan program penanggulangan *stunting* mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dengan menerapkan pendekatan konvergen.

Kabupaten Lampung Selatan telah meluncurkan Gerakan Swasembada Gizi (GSG) sebagai strategi utama untuk mengatasi tingginya prevalensi *stunting* di wilayahnya. Program ini tercantum dalam Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2020 mengenai Program Swasembada Gizi dan dirancang sebagai respons menyeluruh terhadap permasalahan gizi kronis yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di daerah tersebut. Melalui pendekatan multidisiplin, Gerakan Swasembada Gizi berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam praktik gizi yang sehat, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan intervensi. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan optimal anak-anak, dengan harapan dapat meminimalisir dampak jangka panjang *stunting* terhadap kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan.

Program Swasembada Gizi diluncurkan dengan dua tujuan utama, yakni meningkatkan mutu layanan pemerintah daerah dan memperkuat peran aktif masyarakat dalam mencapai kemandirian gizi yang berkelanjutan. Tujuan ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penanggulangan masalah gizi, khususnya *stunting*. Dengan peningkatan mutu layanan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan akses yang lebih optimal terhadap informasi, edukasi, dan intervensi gizi yang terbukti efektif. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai pilar utama dalam memastikan keberlanjutan praktik gizi yang sehat di tingkat keluarga dan komunitas. Dengan demikian, program ini berupaya menciptakan sinergi antara peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat, yang diharapkan dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang terhadap status gizi populasi.

Strategi nasional dalam mengurangi *stunting* telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Strategi tersebut dirancang untuk memperkuat komitmen dan visi kepemimpinan dalam program pengurangan angka *stunting*, salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat pusat dan daerah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bahkan sebelum diterbitkannya Perpres 72/2021, telah menginisiasi pembentukan Tim Swasembada Gizi dari tingkat kabupaten hingga desa. Khusus di tingkat desa, dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Gerakan swasembada gizi mengacu pada berbagai upaya baru yang dilakukan untuk menciptakan ketahanan pangan dan gizi secara mandiri di suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan. Inovasi ini dapat melibatkan pengembangan produk pangan lokal, penyuluhan gizi, teknologi pertanian, atau bahkan program-program yang mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Swasembada gizi dapat mengurangi ketergantungan pada pangan luar daerah dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

Advokasi Gerakan Swasembada Gizi kepada kepala daerah masa bakti 2016-2026 telah berhasil menjadikan Gerakan Swasembada Gizi menjadi upaya

penanganan *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan wajib dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Lampung Selatan.

Gerakan Swasembada Gizi adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, yang diinisiasi oleh Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka memastikan generasi penerus Lampung Selatan yang unggul, dengan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri.

Sebagai program prioritas, pelaksanaan Gerakan Swasembada Gizi tidak hanya dilakukan di tingkat desa dan masyarakat, tetapi juga menjangkau tingkat kabupaten dan kecamatan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari inisiatif ini, dengan harapan besar bahwa pada tahun 2024 angka stunting di Lampung Selatan akan turun di bawah 5%. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait sangat esensial untuk memastikan tujuan program ini tercapai dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Prevalensi, Jumlah Balita Stunting dan Kemiskinan di 100 Kabupaten/Kota Prioritas Intervensi (Provinsi Lampung)

Kabupaten	Penduduk 2016 (ribu jiwa)	Prevalensi Stunting 2013 (%)	Jumlah Balita Stunting 2013 (jiwa)	Tingkat Kemiskinan 2016 (%)	Jumlah Penduduk Miskin 2016 (ribu jiwa)
Lampung Selatan	980	43.01	42.971	16.16	158
Lampung Timur	1.016	43.17	40.790	16.98	173
Lampung Tengah	1.247	52.68	59.838	13.28	166

Sumber: diolah peneliti dari data buku ringkasan stunting TNP2K

Sejak tahun 2021, Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten fokus penanganan stunting di Indonesia melalui Surat Keputusan Kepala Bappenas Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021. Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengupayakan

pelaksanaan program penanggulangan stunting mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dengan menerapkan pendekatan konvergen.

Kabupaten Lampung Selatan telah meluncurkan Gerakan Swasembada Gizi (GSG) sebagai strategi utama untuk mengatasi tingginya prevalensi stunting di wilayahnya. Program ini tercantum dalam Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2020 mengenai Program Swasembada Gizi dan dirancang sebagai respons menyeluruh terhadap permasalahan gizi kronis yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di daerah tersebut. Melalui pendekatan multidisiplin, Gerakan Swasembada Gizi berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam praktik gizi yang sehat, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan intervensi. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan optimal anak-anak, dengan harapan dapat meminimalisir dampak jangka panjang stunting terhadap kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan.

Program Swasembada Gizi diluncurkan dengan dua tujuan utama, yakni meningkatkan mutu layanan pemerintah daerah dan memperkuat peran aktif masyarakat dalam mencapai kemandirian gizi yang berkelanjutan. Tujuan ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penanggulangan masalah gizi, khususnya *stunting*. Dengan peningkatan mutu layanan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan akses yang lebih optimal terhadap informasi, edukasi, dan intervensi gizi yang terbukti efektif. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai pilar utama dalam memastikan keberlanjutan praktik gizi yang sehat di tingkat keluarga dan komunitas. Dengan demikian, program ini berupaya menciptakan sinergi antara peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat, yang diharapkan dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang terhadap status gizi populasi.

Strategi nasional dalam mengurangi stunting telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Strategi tersebut dirancang untuk memperkuat komitmen dan visi kepemimpinan dalam

program pengurangan angka stunting, salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat pusat dan daerah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bahkan sebelum diterbitkannya Perpres 72/2021, telah menginisiasi pembentukan Tim Swasembada Gizi dari tingkat kabupaten hingga desa. Khusus di tingkat desa, dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Gerakan swasembada gizi mengacu pada berbagai upaya baru yang dilakukan untuk menciptakan ketahanan pangan dan gizi secara mandiri di suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan. Inovasi ini dapat melibatkan pengembangan produk pangan lokal, penyuluhan gizi, teknologi pertanian, atau bahkan program-program yang mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Swasembada gizi dapat mengurangi ketergantungan pada pangan luar daerah dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

Advokasi Gerakan Swasembada Gizi kepada kepala daerah masa bakti 2016-2026 telah berhasil menjadikan Gerakan Swasembada Gizi menjadi upaya penanganan *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan wajib dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Lampung Selatan.

Gerakan Swasembada Gizi adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, yang diinisiasi oleh Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka memastikan generasi penerus Lampung Selatan yang unggul, dengan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri.

Sebagai program prioritas, pelaksanaan Gerakan Swasembada Gizi tidak hanya dilakukan di tingkat desa dan masyarakat, tetapi juga menjangkau tingkat kabupaten dan kecamatan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari inisiatif ini, dengan harapan besar bahwa pada tahun 2024 angka stunting di Lampung Selatan akan turun di bawah 5%. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait sangat esensial untuk

memastikan tujuan program ini tercapai dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel. 2 *Prevalensi Balita Stunting* di Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung (dalam %)

No.	Kabupaten/Kota	2013	2019	2021	2022	2023
1.	Pesawaran	50,8	25,84	17,6	25,1	10,00
2.	Lampung Utara	32,5	38,56	20,2	24,7	23,50
3.	Mesuji	43,4	27,44	21,8	22,5	5,00
4.	Tanggamus	39,7	27,39	25	20,4	17,10
5.	Way Kanan	29,7	18,95	20,7	18,4	22,70
6.	Lampung Timur	43,2	26,12	15,3	18,1	14,20
7.	Pesisir Barat	-	19,89	22,8	16,7	16,10
8.	Lampung Barat	34,6	22,23	22,7	16,6	24,60
9.	Tulang Bawang Barat	40,1	17,39	22,1	16,4	10,50
10.	Pringsewu	37	17,76	19	16,2	15,80
11.	Bandar Lampung	44,6	36,08	19,4	11,1	13,40
12.	Metro	47,3	25,03	19,7	10,4	7,10
13.	Tulang Bawang	40,9	15,39	9,5	10,2	9,80
14.	Lampung Selatan	43	30,39	16,3	9,9	10,30
15.	Lampung Tengah	52,7	21,41	20,8	8,7	14,90
	Provinsi Lampung	42,6	22,26	18,5	15,2	

Sumber: Riskesdas 2013, SSGBI 2019, SSGI 2021, SSGI 2022, dan SKI 2023

Data dalam tabel di atas mengungkapkan adanya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan secara konsisten selama tiga tahun terakhir. Gerakan Swasembada Gizi di wilayah tersebut merupakan sebuah inovasi kebijakan yang mengintegrasikan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting secara menyeluruh.

Penelitian-penelitian yang lebih dahulu terkait inovasi penanggulangan *stunting* antara lain adalah penelitian dengan judul “Inovasi Program Penanganan *Stunting* oleh Petugas Kesehatan Puskesmas Sembalun” yang dilakukan oleh Elisa Sulistia Fitri, Mira Utami Ningsih, dan Mely Ratnasari Thiu, penelitian ini menggambarkan bahwa untuk menangani *Stunting* dengan maksimal, melalui Dinas Kesehatan di setiap kabupaten, berbagai macam program penanganan *Stunting* diimplementasikan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, Puskesmas diberikan kewenangan membentuk

program yang didasarkan pada data dan karakteristik masing-masing masyarakat binaan. Puskesmas Sembalun sendiri telah menjalankan beberapa program guna menangani kasus *stunting*. Program-program yang dibentuk disesuaikan dengan hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui program posyandu keluarga. Temuan utama dalam penelitian ini adalah terdapat tiga jenis inovasi program penanganan *stunting* yang dilakukan oleh petugas program *stunting*. Program-program inovasi tersebut diantaranya; Kebabting, Pos Gizi dan Bakti *Stunting*. Penentuan jenis inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas tentunya berbeda-beda tergantung karakteristik atau situasi masyarakat (Fitri, Thiu, & Ningsih, 2024).

Penelitian lainnya adalah, “Efektivitas Program Inovasi Pencegahan *Stunting* Menuju Banyuwangi *Zero Stunting*” oleh Firdawsyi Nuzula, et.al: 2024). Penelitian ini dengan locus di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mengevaluasi tantangan penanganan *stunting* dan keefektifan program inovasi yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa program inovasi dalam upaya pencegahan *stunting* menuju Banyuwangi zero *stunting* diantaranya Banyuwangi Tanggap *Stunting* (BTS), generasi anak top, aksi penting bu Rina, Posting dong, gempur *stunting*, anting mas, bunga ranting dan pelita anak (Dinkes Kab. Banyuwangi, 2022). Strategi penanganan *stunting* melibatkan seluruh lintas sektor baik dalam strategi intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif sebagai upaya untuk mempercepat angka penurunan *stunting* (Nuzula et.al., 2024).

Penelitian-penelitian tersebut lebih memfokuskan akan adanya inovasi di tingkat kecamatan atau lebih kecil lagi di tingkat puskesmas setempat. Keterbaruan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini melihat pada aspek penanggulangan *stunting* secara lebih terintegrasi dan menyeluruh sehingga memudahkan dalam proses implementasi dan evaluasinya.

Berdasarkan hasil kajian literatur terdahulu, dipandang perlu untuk dilakukan juga suatu kajian dampak kebijakan dalam hal ini Gerakan Swasembada Gizi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga telah menunjukkan tren

perbaikan kasus *stunting* walaupun masih terdapat angka *prevalensi* yang muncul.

Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dapat membantu pemerintah untuk membangun basis pengetahuan yang kuat dan mendorong perubahan cara menyelenggarakan program, peningkatan kinerja, akuntabilitas, transparansi, pengetahuan dan mempercepat pembelajaran. Untuk memastikan keberlanjutannya, sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil ini perlu mendapat perhatian, dukungan sumber daya, dan komitmen politik secara terus menerus. Pemantauan dan evaluasi akan menitikberatkan pada: (a) implementasi dan capaian program; (b) output kunci; dan (c) faktor-faktor yang mendukung percepatan pencegahan *stunting*. Keselarasan GSG dengan pilar-pilar nasional ini, seperti komitmen kepemimpinan, pendekatan multi-sektoral, dan partisipasi masyarakat, menunjukkan bahwa GSG bukan sekadar inisiatif lokal yang terisolasi. Sebaliknya, ini adalah implementasi lokal yang terintegrasi dari strategi nasional yang lebih luas. Hal ini memperkuat legitimasi program dan potensi keberlanjutannya dalam jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan di atas, rumusan masalah yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Gerakan Swasembada Gizi dalam menurunkan *prevalensi stunting* di Kabupaten Lampung Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan implementasi Gerakan Swasembada Gizi dalam penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis yang mencakup beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Memperkaya pengetahuan dalam mendukung pengembangan ilmu untuk dibidang Ilmu Pemerintahan

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini menyuguhkan gagasan yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti dalam meningkatkan dan mengoptimalkan ilmu pengetahuan, khususnya di ranah kebijakan.

- a. Dapat menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan masalah *stunting* serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti kebijakan serta dijadikan sebagai sumber informasi tambahan yang mendukung perencanaan kebijakan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi strategis bagi wilayah lain yang masih menghadapi tingkat *stunting* yang tinggi.
- c. Temuan penelitian ini menyumbangkan ide-ide berharga untuk mengembangkan layanan pelaksanaan tugas yang lebih efektif bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Carl Frederich (1969) dalam Agustino (2008:6), menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sedangkan Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Agustino: 2008).

Kebijakan ada sebagai usaha pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat Menurut Parker (1975) yang dikutip oleh Wahab (2008:46), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Definisi kebijakan

Seperti terurai diatas secara umum memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi).
2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat.
3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya.
4. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
6. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik.

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan menurut Kartasamita dalam (Joko Widodo, 2008), merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah; apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi; dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam (Arif Rohman, 2014).

Menurut (A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008) Kebijakan merupakan suatu kata benda asli dari deliberasi mengenai tindakan (behavior) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai ramburambu tindakan dari seseorang atau

lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi tindakan tersebut.

Dye, (dalam Triana, 2011) memberikan pendapatnya mengenai definisi dari kebijakan publik. menurutnya, kebijakan publik adalah *whatever government choose to do or not to do*. Maksudnya adalah setiap pilihan yang diambil pemerintah, baik itu memberikan aksi dengan menangani maupun dengan membiarkan, itu adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelesaian dari suatu masalah. Menurut (Mustopadidjaja, 2003) merumuskan lebih operasional lagi, yaitu: kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, Negara dan pembangunan. Tidak semua kebijakan publik setelah diimplementasikan akan berhasil dan begitu juga sebaliknya tidak semua kebijakan publik gagal dalam implementasinya, kegagalan tersebut menurut (Gunn, 1989) seperti dikutip oleh (Wahab, 1990) disebabkan oleh, (1) karena non implementation (tidak diimplementasikan) dan (2) karena *unsuccessfull* (implementasi yang tidak berhasil).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diputuskan untuk tidak dilakukan oleh pemerintahan termasuk suatu kebijakan karena apa yang dipilih untuk tidak dilakukan akan berdampak sama besarnya dengan apa yang dipilih untuk dilakukan.

Menurut Charles O. Jones (1977:4), kebijakan publik adalah segala tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Di dalamnya, ada beberapa komponen penting:

1. Sasaran (Goals), Ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.
2. Rencana/Proposal (Plans/Proposal), Bagian ini menjelaskan alat atau metode spesifik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.
3. Program (Programs), Ini adalah implementasi formal dari rencana, berfungsi sebagai alat nyata untuk mencapai sasaran.
4. Keputusan (Decisions), Ini mencakup tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, menyusun rencana, menjalankan, dan mengevaluasi program.
5. Dampak (Efek), Ini adalah hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan maupun tidak, serta dampak utama atau sampingan.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Indiahono, 2009) menemukan bahwa istilah kebijakan publik sangat beragam. Setelah melakukan penelitian ekstensif, mereka mengelompokkan ragam istilah tersebut ke dalam sepuluh kategori utama:

1. Kebijakan sebagai Label Bidang Kegiatan, Kebijakan bisa dilihat sebagai penamaan untuk suatu area spesifik yang menjadi fokus aktivitas pemerintah.
2. Kebijakan sebagai Tujuan Umum, Kebijakan dapat diartikan sebagai pernyataan yang menjelaskan sasaran umum atau kondisi yang diinginkan.
3. Kebijakan sebagai Usulan Khusus, Terkadang, kebijakan merujuk pada proposal atau gagasan yang sangat spesifik.
4. Kebijakan sebagai Keputusan Pemerintah, Ini menekankan bahwa kebijakan adalah hasil dari keputusan yang diambil oleh pemerintah.
5. Kebijakan sebagai Otorisasi Formal, Kebijakan juga bisa diartikan sebagai bentuk persetujuan atau pengesahan resmi.
6. Kebijakan sebagai Program, Dalam pengertian ini, kebijakan adalah rangkaian kegiatan terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan.

7. Kebijakan sebagai Keluaran (Output), Ini fokus pada produk atau layanan yang dihasilkan dari suatu kebijakan.
8. Kebijakan sebagai Hasil Akhir (Outcome), Pengertian ini melihat kebijakan dari dampak atau konsekuensi jangka panjang yang dihasilkannya.
9. Kebijakan sebagai Teori atau Model, Kebijakan dapat dipahami sebagai kerangka konseptual atau pendekatan teoritis.
10. Kebijakan sebagai Proses, Terakhir, kebijakan dapat dilihat sebagai serangkaian langkah atau tahapan yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dalam penelitian ini, kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (individu atau kelompok) untuk mengatasi masalah publik. Proses ini dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman-pedoman tertentu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi kebijakan adalah tahap berikutnya setelah sebuah kebijakan disahkan menjadi peraturan atau undang-undang. Pada tahap ini, kebijakan tersebut diwujudkan secara nyata dan diterapkan kepada masyarakat. Kebijakan itu sendiri dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Untuk lebih memahami, mari kita simak beberapa definisi implementasi kebijakan menurut para ahli.

George C. Edwards III (dalam Winarno, 2007) mengartikan implementasi sebagai:

“..the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect”

Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan sangat penting dalam bidang administrasi dan kebijakan publik. Implementasi ini merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan, berada di antara perumusan kebijakan dan dampak yang dirasakan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada implementasinya. Sebuah kebijakan bisa saja gagal mencapai tujuannya, bahkan jika diterapkan dengan sempurna, apabila perumusan awalnya tidak tepat atau tidak mampu mengatasi akar masalah. Sebaliknya, kebijakan yang dirancang dengan sangat baik pun bisa gagal jika pelaksanaannya kurang optimal.

Van Meter dan van Horn (1975) memiliki pandangan luas tentang implementasi kebijakan. Bagi mereka, ini adalah tahap langsung setelah sebuah undang-undang disahkan. Secara umum, implementasi berarti menerapkan undang-undang tersebut, di mana berbagai pihak, lembaga, prosedur, dan metode bekerja sama untuk menjalankan kebijakan demi mencapai tujuan atau program yang telah ditetapkan (Winarno, 2007).

Sabatier dan Mazmanian berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan publik. Ini berarti mewujudkan keputusan kebijakan yang memiliki dasar hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif, ke dalam program-program kerja nyata. Program-program ini dirancang untuk mengatasi masalah spesifik yang menjadi sasaran kebijakan (Triana, 2011). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian:

“The process normally runs through a number of stages beginning with passage the basic statut, followed by policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important revisions (or attempted revisions) in the basic statute”

Menurut Sabatier dan Mazmanian, ada tiga faktor utama yang memengaruhi suksesnya implementasi kebijakan:

1. Karakteristik Masalah, Seberapa mudah atau sulit masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan tersebut.
2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang, Seberapa baik kebijakan atau undang-undang dirancang untuk memandu proses implementasi.
3. Variabel Lingkungan, Faktor-faktor eksternal yang tidak termasuk dalam kebijakan itu sendiri tetapi dapat memengaruhi pelaksanaannya.

Menurut Grindle, implementasi sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Peran utamanya adalah menghubungkan agar sasaran kebijakan dapat dicapai melalui tindakan pemerintah. Ini berarti membangun "sistem penyampaian kebijakan" yang melibatkan perancangan dan pengoperasian sumber daya serta mekanisme tertentu untuk meraih hasil yang diharapkan. Singkatnya, tugas implementasi adalah menciptakan kaitan yang memungkinkan tujuan kebijakan terwujud melalui kegiatan pemerintah, termasuk pembentukan sistem yang mengantarkan kebijakan secara efektif (Winarno, 2007).

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai tahap lanjutan atau pelaksanaan nyata dari kebijakan atau keputusan yang dibuat. Ini mencakup tindakan serta penyediaan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah ditetapkan di awal.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan memiliki beragam versi, masing-masing dengan variabel penentu yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena sudut pandang para ahli yang bervariasi dalam teori atau model yang mereka ajukan, mengingat cara pandang mereka terhadap implementasi kebijakan juga berbeda. Awalnya, studi implementasi terbagi menjadi dua perspektif utama yang terpisah dari formulasi kebijakan. Pertama adalah pendekatan *top-down*, di mana kebijakan dibuat di tingkat pusat dan kemudian

diimplementasikan oleh daerah. Kedua adalah pendekatan *bottom-up*, yang melibatkan aspirasi dari bawah, termasuk pihak-pihak yang akan menjadi pelaksana, dalam perumusan kebijakan. Namun, kini telah berkembang model baru yang disebut sintesis atau *hybrid*. Model ini menekankan bahwa tidak ada satu model perspektif pun yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik kebijakan tersebut.

Berikutnya, kami akan dijelaskan beberapa model implementasi kebijakan yang diajukan oleh para ahli, beserta variabel-variabel penentu yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

1. Model Implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier

Dalam buku "*Implementation and Public Policy*," Mazmanian dan Sabatier awalnya mengusulkan model implementasi dengan kerangka analisis yang sangat *top-down*. Namun, Sabatier kemudian mulai memasukkan unsur *bottom-up* ke dalam metodologinya (Triana, 2011).

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan tiga isu inti yang harus dipertanyakan dan dianalisis oleh pembuat kebijakan terkait implementasi (Nugroho, 2011):

- 1) Sejauh mana tindakan badan implementasi dan kelompok sasaran selaras dengan tujuan resmi yang tercantum dalam dokumen kebijakan dan pendukungnya?
- 2) Seberapa jauh tujuan dapat dicapai dan apakah dampak yang dihasilkan sesuai dengan sasaran kebijakan?
- 3) Faktor-faktor utama apa yang memengaruhi *output* dan dampak kebijakan? Apakah ada *output* atau dampak lain yang signifikan secara politik?

Kemudian, Sabatier pada tahun 1986 menambahkan pertanyaan keempat sebagai pengakuan atas peran penting implementor:

- 4) Bagaimana kebijakan diformulasi ulang berdasarkan pengalaman implementasi sebelumnya?

Mereka juga menawarkan metodologi dan rekomendasi untuk mengontrol implementasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan yang dapat menimbulkan kesulitan. Model yang mereka kembangkan mengajukan kerangka analisis implementasi sebagai berikut:

- 1) Proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal lembaga pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi tiga variabel besar: 1). Variabel Kemudahan Masalah (*Tractability Variable*), Seberapa mudah masalah yang ingin diatasi kebijakan dapat dikendalikan; 2). Variabel Daya Dukung Undang-undang (*Statutory Variable*), Kemampuan undang-undang atau peraturan untuk menstrukturkan proses implementasi; 3). Variabel Non-Peraturan (*Non Statutory Variables*), Variabel-variabel di luar peraturan atau kebijakan yang memengaruhi implementasi.
- 2) Variabel Kemudahan Masalah (*Tractability Variable*) berfungsi sebagai variabel independen yang memengaruhi Variabel Daya Dukung Undang-undang (*Statutory Variable*) dan Variabel Non-Peraturan (*Non Statutory Variables*) sebagai variabel *intervening*. Bersama-sama, ketiganya memengaruhi tahapan proses implementasi.
- 3) Proses implementasi terdiri dari lima tahapan yang masing-masing dapat menjadi variabel dependen untuk tahap berikutnya.
- 4) Pembuat kebijakan harus memfokuskan perhatian pada variabel *intervening* yang masih dalam kendali mereka, yaitu kemampuan untuk menstrukturkan proses implementasi (*Statutory Variable*), serta upaya untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan masyarakat terhadap kebijakan.

Berikut adalah penjabaran masing-masing variabel (dan kelompok variabel) tersebut:

1. Variabel Independen: Karakteristik Permasalahan

Indikator mudah atau sulitnya permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Ketersediaan teknologi dan teori teknis yang relevan dengan masalah kebijakan.
- b. Keberagaman perilaku kelompok sasaran.
- c. Sifat populasi yang menjadi target kebijakan.
- d. Derajat perubahan yang diperlukan.

2. Variabel *Intervening*:

- a. Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Implementasi, bahwa setiap kebijakan memiliki kemampuan untuk menstrukturkan proses implementasinya secara tetap, dengan indikator:

- 1) Kejelasan dan konsistensi tujuan.
- 2) Adanya dukungan teori sebab-akibat yang memadai.
- 3) Ketepatan alokasi sumber dana.
- 4) Keterpaduan hierarkis di dalam dan antar instansi pelaksana.
- 5) Aturan pelaksanaan dari para agen pelaksana.
- 6) Perekrutan pejabat pelaksana.
- 7) Akses formal yang diberikan bagi pihak luar untuk terlibat.

- b. Variabel Non-Kebijakan:

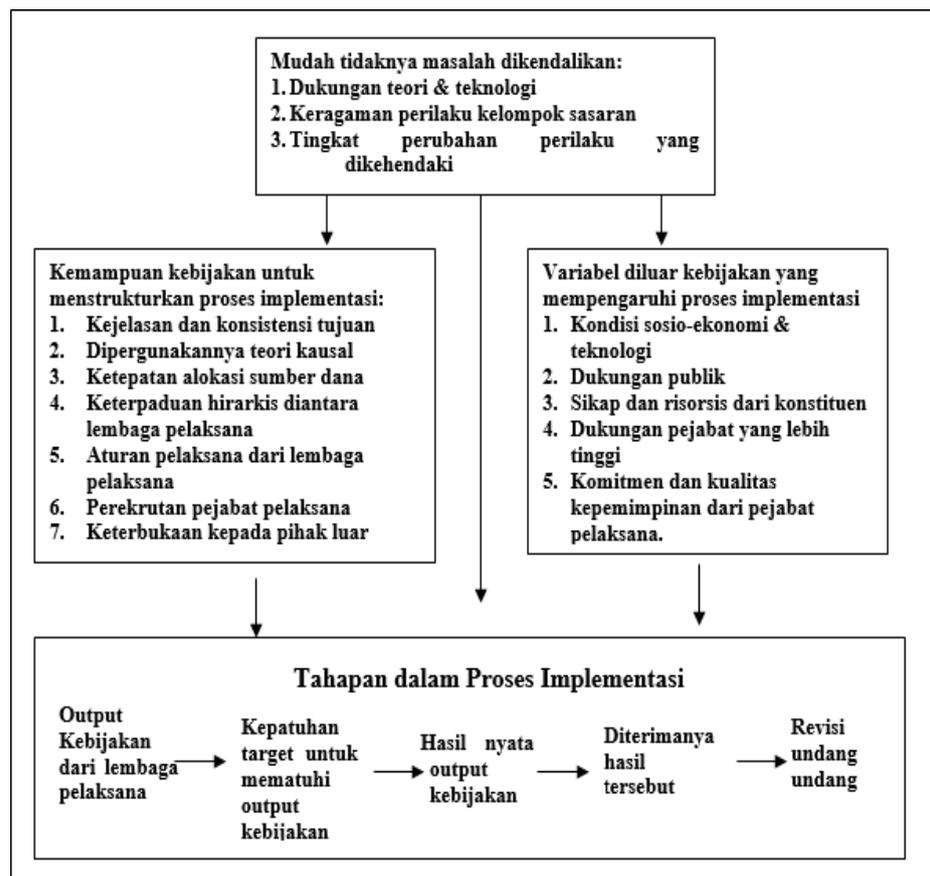
- 1) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.
- 2) Perhatian media terhadap permasalahan kebijakan.
- 3) Dukungan publik.
- 4) Sikap dan sumber daya konstituen.
- 5) Dukungan pejabat yang lebih tinggi.
- 6) Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel Dependen: Proses Implementasi

Terdiri dari lima tahap, di mana setiap tahap dapat menjadi penentu keberhasilan bagi tahap berikutnya:

- a. Keluaran-keluaran kebijakan dari badan pelaksana.
- b. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap keluaran-keluaran kebijakan.
- c. Dampak nyata dari keluaran-keluaran kebijakan.
- d. Dampak yang dipersepsikan atas keluaran-keluaran kebijakan tersebut.
- e. Evaluasi atau perbaikan mendasar terhadap output kebijakan, serta perbaikan dalam isi kebijakan yang telah ditetapkan setelah adanya umpan balik.

Gambar 4. Model Kerangka Analisis Implementasi Mazmanian & Sabatier



Sumber: Triana, 2011, *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Fisip Universitas Airlangga, Surabaya.

Model implementasi yang diusulkan oleh Sabatier dan Mazmanian tergolong sangat kompleks karena berupaya mencakup semua variabel yang secara logis dapat memengaruhi proses dan hasil implementasi. Secara teoritis, alur model ini mudah dipahami, membantu kita mengerti logika di balik perancangan struktur proses implementasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi implementasi sehingga perlu diwaspadai agar hasilnya lebih sukses.

2. Model Implementasi oleh Hogwood dan Gunn

Model implementasi yang diajukan oleh Hogwood dan Gunn sering disebut sebagai "pendekatan *top-down*". Mereka menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan dengan sukses, beberapa syarat perlu dipenuhi (Triana, 2011):

- 1) Stabilitas Lingkungan Eksternal, Dipastikan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Ketersediaan Sumber Daya Memadai, Harus ada sumber daya yang cukup, termasuk waktu, untuk melaksanakan kebijakan. Ini menekankan aspek kelayakan implementasi.
- 3) Kendala Sumber Daya Minimum, Tidak ada hambatan dalam penyediaan seluruh sumber daya yang dibutuhkan di setiap tahapan implementasi.
- 4) Dasar Teori Sebab-Akibat yang Valid, Kebijakan yang akan diimplementasikan harus didasarkan pada teori yang jelas mengenai hubungan sebab-akibat.
- 5) Hubungan Langsung Tanpa Perantara, Hubungan sebab-akibat harus bersifat langsung dan seminimal mungkin ada variabel *intervening* (perantara).
- 6) Pelaksana Tunggal atau Ketergantungan Minimal, Kebijakan diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung

pada lembaga lain. Jika melibatkan pihak lain, ketergantungan antarlembaga harus sangat minim.

- 7) Pemahaman dan Kesepakatan Penuh, Adanya pemahaman menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang ingin dicapai, yang harus dipertahankan sepanjang proses implementasi.
- 8) Spesifikasi Tugas yang Lengkap, Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati harus dapat dispesifikasikan secara lengkap, detail, dan sempurna.
- 9) Komunikasi dan Koordinasi Sempurna, Terjadi komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara semua elemen yang terlibat dalam program.
- 10) Kewenangan Menuntut Kepatuhan, Pihak yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan penuh.

Hogwood dan Gunn berpendapat bahwa implementasi yang sempurna mungkin tercapai jika seluruh sistem administrasi dapat dikontrol sepenuhnya, sehingga semua kondisi di atas terpenuhi. Meskipun demikian, mereka juga menyadari bahwa kondisi ideal seperti ini hampir mustahil di dunia nyata. Proposisi-proposisi ini berfungsi sebagai syarat normatif yang harus diupayakan agar implementasi dapat berjalan mendekati kesempurnaan.

3. Model Implementasi oleh Grindle

Grindle berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada isi (content) dan konteksnya. Tingkat keberhasilan ini juga ditentukan oleh kondisi tiga komponen variabel sumber daya yang diperlukan. Ketiga komponen ini menjelaskan mengapa program nasional dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang bervariasi di setiap daerah (Triana, 2011):

- 1) Isi Pesan Kebijakan (*Contents of Policy Messages*)

- a. Ketersediaan dana dan sumber daya lain untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Adanya sanksi.
 - c. Tingkat kesulitan masalah kebijakan.
- 2) Kredibilitas Pesan Kebijakan
- a. Kejelasan pesan kebijakan.
 - b. Konsistensi kebijakan.
 - c. Frekuensi pengulangan kebijakan.
 - d. Penerimaan pesan.
- 3) Bentuk Kebijakan
- a. Efektivitas kebijakan (*efficacy of the policy*).
 - b. Partisipasi masyarakat.
 - c. Tipe kebijakan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua sisi:

- a. Dari Prosesnya, Apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah dirancang (*design*) atau merujuk pada aksi kebijakan yang telah ditentukan.
- b. Ketercapaian Tujuan, Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak kebijakan terhadap individu atau kelompok masyarakat, serta tingkat perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari konten dan konteks kebijakan:

- a. Konten Kebijakan, Meliputi kepentingan yang memengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang ingin dicapai, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan.

- b. Konteks Kebijakan, Terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana.

4. Model Implementasi oleh van Meter dan van Horn

Van Meter dan Van Horn memperkenalkan model proses implementasi kebijakan, yang menekankan pentingnya memahami isi kebijakan karena efektivitas implementasi sangat bergantung pada jenis dan isu kebijakan yang dihadapi. Mereka berpendapat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akan bervariasi, dan setiap jenis kebijakan akan membutuhkan karakteristik proses, struktur, serta hubungan antar berbagai faktor yang berbeda dalam implementasinya (Triana, 2011).

Meskipun model mereka menyoroti pentingnya partisipasi implementor dalam perumusan tujuan kebijakan, pendekatannya tetap tergolong *top-down*. Ini karena Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan kepada implementor melalui jaringan antar-organisasi. Dengan kata lain, yang terpenting adalah implementor memahami dan menyetujui tujuan serta standar yang telah ditetapkan, bukan ikut menentukannya.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel atau kelompok variabel yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi:

- 1) Tujuan dan Standar Kebijakan yang Jelas
Merujuk pada rincian sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan, serta standar untuk mengukur keberhasilannya.
- 2) Sumber Daya
Mencakup dana dan berbagai insentif yang dapat memfasilitasi efektivitas implementasi.
- 3) Kualitas Hubungan Antar-Organisasi

Seringkali mensyaratkan prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan.

4) Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana

Meliputi kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.

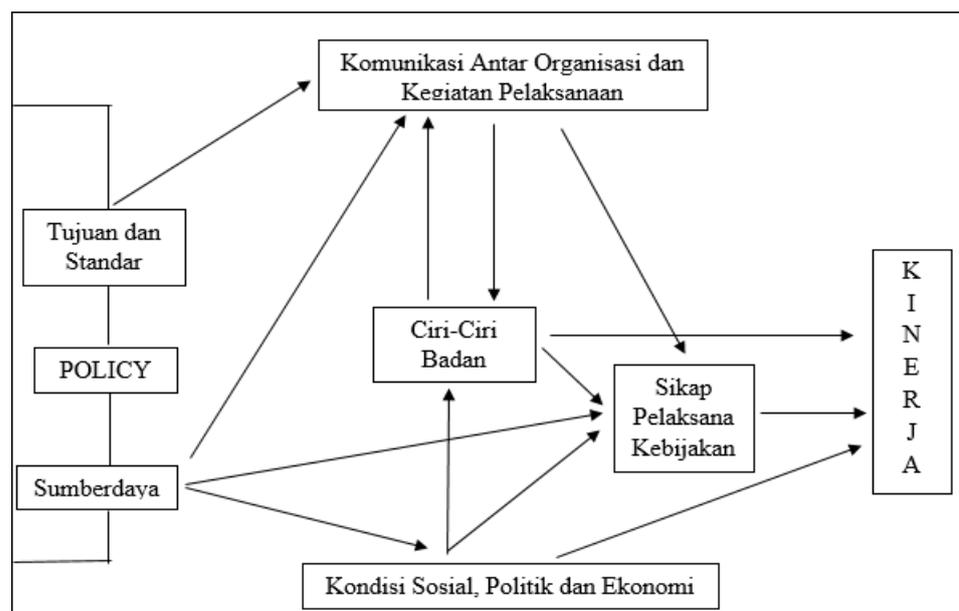
5) Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi

Membahas apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik terhadap kebijakan, serta apakah elit mendukung implementasi.

6) Disposisi/Tanggapan atau Sikap Pelaksana

Mencakup pengetahuan dan pemahaman mereka tentang isi dan tujuan kebijakan, sikap mereka terhadap kebijakan tersebut, serta intensitas sikap tersebut.

Bagan 5. Model Implementasi Kebijakan dari van Meter dan van Horn



Sumber: Meter, Horn, *The Policy Implementation Process: A conceptual Framework. Administration and Society* 6 (1975), 1975, Sage Publication.

5. Model Implementasi oleh George C. Edward III

George C. Edward III memperkenalkan model implementasi kebijakan yang dikenal sebagai *implementing problem approach*. Model ini berfokus pada dua pertanyaan utama: Apa saja prasyarat agar implementasi kebijakan berhasil? dan Apa hambatan utama yang menyebabkan kegagalan implementasi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Edward mengidentifikasi empat variabel kunci dalam implementasi kebijakan public (Mulyadi, 2018). Teori George C. Edward Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, (Subarsono, 2011: 90-92) yaitu:

1) **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman implementor mengenai apa yang harus mereka lakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran agar tidak terjadi distorsi. Jika tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan besar akan muncul resistensi.

- a. Relevansi: Gerakan Swasembada Gizi sangat bergantung pada bagaimana informasi mengenai program, tujuan, dan langkah-langkah pelaksanaannya disosialisasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait: pemerintah daerah (kabupaten hingga desa), tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, keluarga dengan balita).
- b. Analisis: Model Edward III memungkinkan analisis mengenai:
 - 1) Apakah tujuan "Swasembada Gizi" (yaitu Lampung Selatan Bebas Stunting 2024) dikomunikasikan secara jelas dan konsisten?

- 2) Seberapa efektif saluran komunikasi yang digunakan (misalnya, sosialisasi di tingkat desa, kampanye media, penyuluhan oleh kader)?
- 3) Apakah ada distorsi informasi atau kesalahpahaman di antara para pelaksana dan masyarakat?
- 4) Tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi dan praktik pencegahan stunting.

2) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia (kompetensi implementor) dan finansial. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas.

- a. Relevansi: Keberhasilan Gerakan Swasembada Gizi sangat tergantung pada ketersediaan dan alokasi sumber daya. Ini mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga sumber daya manusia dan fasilitas.
- b. Analisis: Model Edward III memungkinkan analisis mengenai:
 - 1) Kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk program, termasuk PMT, suplemen gizi, pelatihan kader, dan pembangunan sarana sanitasi.
 - 2) Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, seperti tenaga gizi, bidan, kader Posyandu, dan penyuluh pertanian. Apakah jumlah kader memadai dan apakah mereka memiliki kapasitas yang cukup?
 - 3) Ketersediaan fasilitas pendukung, seperti Posyandu, Puskesmas, dan akses terhadap air bersih serta jamban sehat.
 - 4) Ketersediaan pangan lokal yang bergizi untuk mendukung kemandirian gizi keluarga.

3) Disposisi (Kecenderungan)

Disposisi merujuk pada karakter dan sifat implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, mereka akan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika disposisi implementor kurang baik, proses implementasi bisa menjadi tidak efektif.

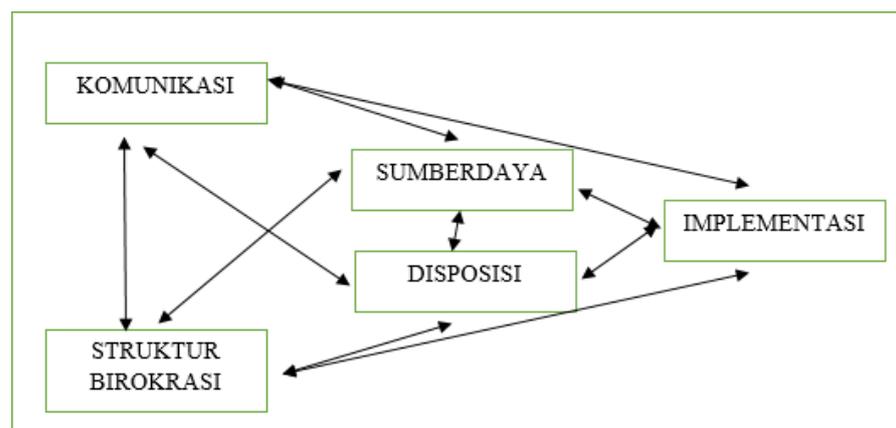
- a. Relevansi: Sikap dan komitmen para pelaksana, baik dari birokrat, tenaga kesehatan, kader, hingga partisipasi masyarakat, sangat menentukan keberhasilan program. Gerakan Swasembada Gizi mengedepankan partisipasi masyarakat secara mandiri.
- b. Analisis: Model Edward III memungkinkan analisis mengenai:
 - 1) Bagaimana sikap dan komitmen para pembuat kebijakan di tingkat kabupaten dan kecamatan terhadap gerakan ini.
 - 2) Tingkat motivasi dan kepedulian tenaga kesehatan dan kader dalam menjalankan tugas-tugas intervensi gizi.
 - 3) Tingkat penerimaan dan partisipasi aktif masyarakat sasaran dalam mengikuti program-program gizi, seperti Posyandu, kelas ibu hamil, atau pemanfaatan pekarangan untuk pangan.
 - 4) Adakah resistensi atau hambatan psikologis/budaya dari masyarakat terhadap perubahan perilaku gizi?

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan. Salah satu aspek penting dari struktur ini adalah adanya prosedur standar (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan dapat

menyebabkan *red-tape* (prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks), yang pada akhirnya menghambat implementasi.

- a. Relevansi: Struktur organisasi dan prosedur birokrasi yang jelas dan efisien sangat penting untuk koordinasi antar sektor dan keberlanjutan program. Mengingat sifat intervensi stunting yang multidimensional (kesehatan, pertanian, sanitasi, dll.), koordinasi menjadi krusial.
- b. Analisis: Model Edward III memungkinkan analisis mengenai:
 - 1) Sejauh mana ada koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, PMD, dll.) dalam mendukung Gerakan Swasembada Gizi.
 - 2) Apakah ada Standard Operating Procedures (SOP) yang jelas untuk pelaksanaan setiap aksi konvergensi?
 - 3) Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab didistribusikan dari tingkat kabupaten hingga desa dalam program ini?
 - 4) Adakah hambatan birokrasi, seperti tumpang tindih kewenangan atau kurangnya integrasi program.



Gambar 6. Model Implementasi menurut Edward III

Sumber: Mulyadi, 2018, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung

Model implementasi kebijakan George C. Edward III sangat cocok untuk menganalisis gerakan Swasembada Gizi di Lampung Selatan karena model ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan atau program. Gerakan Swasembada Gizi, sebagai sebuah inisiatif besar yang melibatkan berbagai pihak, memiliki kompleksitas yang dapat dijelaskan dengan baik melalui empat variabel kunci Edward III. Sehingga, dapat mengidentifikasi secara sistematis kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program, serta merumuskan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk keberlanjutan dan peningkatan efektivitas Gerakan Swasembada Gizi menuju Lampung Selatan bebas stunting.

2.2 Konsep Gerakan

2.2.1 Pengertian Gerakan

Istilah "gerakan" tidak dapat dipisahkan dari kata "gerak," yang mengandung beberapa arti, seperti tindakan atau agitasi yang direncanakan oleh suatu kelompok masyarakat melalui program-program tertentu. Tujuannya bisa berupa upaya untuk mengubah kondisi yang ada atau sebagai perlawanan guna melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga yang sudah ada. Gerakan merupakan elemen dinamis dalam ranah politik, sehingga fenomena ini sering muncul di berbagai bentuk masyarakat, terutama yang sedang mengalami perubahan di bidang sosio-ekonomi, budaya, dan politik.

Secara etimologis, gerakan merupakan aktivitas sosial berupa tindakan kolektif yang dilaksanakan oleh kelompok informal, organisasi besar, atau individu yang memfokuskan diri pada isu-isu sosial, budaya, atau politik, dengan cara melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan suatu perubahan sosial (Widyanta, 2002).

Selain itu, gerakan juga dipahami sebagai proses yang berfokus pada upaya mempengaruhi dan mengarahkan tugas-tugas yang berkaitan dengan aktivitas anggota kelompok. Definisi ini mencakup kemampuan untuk mempengaruhi strategi dan tujuan bersama, serta mendorong kelompok agar dapat mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi (Winardi, 1995).

Kesimpulan, konsep gerakan dalam program pemerintah adalah alat yang ampuh untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Dengan tujuan yang jelas, partisipasi luas, dan strategi terkoordinasi, gerakan dapat membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Konsep gerakan dalam kebijakan merujuk pada tindakan kolektif yang terorganisir, seringkali oleh kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan publik, baik melalui tekanan publik, protes, atau kampanye.

Menurut Tarrow (1998) dalam Mohammad (2017), gerakan sosial merupakan aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bersatu dalam tujuan dan solidaritas, yang terus menerus berinteraksi dengan kelompok elit, pihak yang menentang, serta penguasa. Dalam definisi ini, terdapat empat elemen utama, yaitu: tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial, dan interaksi berkelanjutan.

Della Porta dan Diani (1999) menawarkan setidaknya gerakan sosial ditandai oleh empat karakteristik inti, yaitu:

1. Jaringan Interaksi Informal, Gerakan seringkali melibatkan jaringan interaksi yang informal antara individu atau kelompok.
2. Perasaan dan Solidaritas Bersama, Anggota gerakan seringkali memiliki perasaan dan solidaritas yang kuat terhadap tujuan bersama.
3. Konflik sebagai Fokus Aksi Kolektif, Gerakan seringkali muncul sebagai respons terhadap konflik atau ketidakadilan sosial.

4. Mengedepankan Bentuk-Bentuk Protes, Gerakan seringkali menggunakan berbagai bentuk protes, seperti demonstrasi, kampanye, atau aksi boikot.

Konsep gerakan dalam kebijakan merujuk pada peran aktif masyarakat atau kelompok tertentu dalam memengaruhi pembentukan, implementasi, atau perubahan suatu kebijakan publik. Gerakan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari aksi protes, kampanye advokasi, hingga partisipasi dalam forum-forum kebijakan.

Menurut Macdonis gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditunjukkan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Macdonis tersebut, maka dapat digaris bawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni adanya aktivitas yang diorganisir dan ada tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial (Sukmana, 2016). Senada dengan Macdonis, Spencer menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif yang ditunjukkan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ciri utama dari pandangan Spencer adalah adanya upaya kolektif (bersama) dan upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi dari tatanan yang ada.

Gerakan sosial didefinisikan secara beragam oleh para sosiolog. Menurut Cohen (1983), gerakan sosial adalah upaya terorganisir sekelompok orang untuk mengubah atau mempertahankan elemen masyarakat, dicirikan oleh tujuan, perencanaan, dan ideologi. Sementara itu, Zurcher dan Snow (1999) memandang gerakan sosial sebagai aktivitas kolektif yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu-isu tertentu. Touch (1979) mendefinisikannya sebagai usaha kolektif individu untuk menyelesaikan masalah sosial, dan Blumer serta Allen (1980) menganggapnya sebagai kegiatan kolektif untuk menciptakan kehidupan baru. Perbedaan definisi ini menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, mulai dari upaya terencana untuk perubahan hingga ekspresi kolektif kepedulian dan penciptaan kondisi sosial yang baru.

Gusfield dan Allen (1980) berpendapat bahwa gerakan sosial mencerminkan aktivitas dan keyakinan masyarakat yang mengharapkan perubahan pada aspek-aspek kondisi sosial. Secara keseluruhan, berbagai definisi menunjukkan bahwa gerakan sosial adalah tindakan terencana dan terorganisir yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan misi gerakan tersebut.

Gerakan sosial memiliki beberapa ciri khas. David Aberle menggunakan kriteria perubahan yang diinginkan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat, serta skala perubahan yang diidamkan. Sementara itu, Locer (2002) mengidentifikasi tiga ciri utama gerakan sosial:

1. Terorganisir, Perilaku para pendukung gerakan sosial dipandu oleh cara-cara tertentu yang diatur oleh seorang pemimpin, seringkali melalui pembagian tugas kepada anggota.
2. Membutuhkan jangka waktu yang cukup lama, Sebuah gerakan sosial dapat bertahan untuk periode waktu yang relatif panjang, sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Sengaja dibentuk, Keberadaan gerakan sosial memang sengaja dibentuk oleh anggotanya, dengan setiap anggota memainkan peran sesuai tugas masing-masing.

Meskipun berbeda dengan konsep perilaku kolektif yang cenderung spontan dan berjangka pendek, Smelser menjelaskan bahwa perilaku kolektif setidaknya memiliki beberapa ciri:

1. Kondisi structural, Struktur masyarakat yang terbuka memberikan ruang bagi munculnya perilaku kolektif.
2. Tekanan structural, Fenomena ini muncul ketika individu dihadapkan pada masalah penting dan bersama-sama mencari solusi.
3. Keyakinan umum (*Generalized Beliefs*), Keyakinan bersama muncul di kalangan masyarakat mengenai sumber masalah dan solusi yang diperlukan.

4. Faktor pemicu (pendorong), Gerakan muncul ke permukaan didahului oleh berbagai pemicu, terutama jika ada rumor atau isu yang berlebihan dan membangkitkan emosi masyarakat.
5. Aksi mobilisasi, Perilaku kolektif sering muncul karena kehadiran seorang tokoh atau pemimpin yang mampu merumuskan kepentingan dan keinginan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu perilaku kolektif maupun gerakan sosial.

Kesimpulan, konsep gerakan dalam program pemerintah adalah alat yang ampuh untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Dengan tujuan yang jelas, partisipasi luas, dan strategi terkoordinasi, gerakan dapat membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Konsep gerakan dalam kebijakan merujuk pada tindakan kolektif yang terorganisir, seringkali oleh kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan publik, baik melalui tekanan publik, protes, atau kampanye.

2.2.2 Swasembada sebagai Gerakan

Swasembada, yang secara fundamental berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa atau dengan sedikit bantuan eksternal, telah berkembang di Indonesia dari sekadar tujuan kebijakan menjadi sebuah gerakan nasional yang komprehensif. Perjalanan ini ditandai oleh upaya historis seperti program Bimas pada era Orde Baru, yang berhasil mencapai swasembada beras sementara, hingga inisiatif kontemporer seperti Program Swasembada Pangan 2025 dan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih. Gerakan ini menekankan kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, baik pangan maupun energi, tanpa bergantung pada negara lain.

Pendekatan multi-pemangku kepentingan, yang melibatkan pemerintah, petani, sektor swasta, koperasi, dan masyarakat desa, menjadi ciri khas gerakan swasembada saat ini. Manfaat yang diharapkan mencakup kemandirian ekonomi, stabilitas sosial, peningkatan kesejahteraan petani,

dan konservasi sumber daya alam. Namun, gerakan ini juga menghadapi tantangan signifikan seperti alih fungsi lahan, produktivitas rendah, dampak perubahan iklim, dan dinamika perdagangan global.

1. Definisi Konseptual Swasembada

Swasembada, atau self-sufficiency, merujuk pada kondisi di mana suatu individu, entitas, atau sistem memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan eksternal. Entitas yang mandiri dapat mempertahankan kondisi ini secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi, sistem yang memiliki kualitas swasembada juga disebut autarki, yang berarti entitas tersebut dapat bertahan atau melanjutkan aktivitasnya tanpa bantuan eksternal.

Di Indonesia, swasembada secara spesifik diartikan sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan pokok sendiri, seperti beras. Konsep ini menekankan pentingnya kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa bergantung pada negara lain, baik di sektor pangan maupun energi. Sebagai contoh, di sektor energi, swasembada berarti kemampuan negara untuk memproduksi energi yang cukup dari sumber daya lokal untuk kebutuhan domestik, sehingga tidak perlu mengimpor bahan bakar.

2. Interpretasi Swasembada sebagai "Gerakan"

Swasembada di Indonesia bukan hanya sekadar target kebijakan atau tujuan ekonomi semata, melainkan telah diinterpretasikan dan diimplementasikan sebagai sebuah "gerakan" nasional. Ini menunjukkan bahwa pencapaian swasembada memerlukan inisiatif kolektif dan terorganisir yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Swasembada sebagai "gerakan" merujuk pada upaya kolektif atau kampanye untuk mencapai kemandirian dalam suatu bidang, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sendiri. Dalam konteks pangan, ini

berarti mencapai kemampuan untuk memproduksi dan menyediakan sendiri kebutuhan pangan suatu negara atau wilayah tanpa bergantung pada impor. Gerakan ini seringkali melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, petani, dan masyarakat luas, untuk bekerja sama dalam meningkatkan produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan.

2.3 Pengertian *Stunting* dan *Prevalensi Stunting*

2.3.1 Pengertian *Stunting*

Menurut Kementerian Kesehatan RI, *stunting* merupakan kondisi di mana balita gagal tumbuh secara optimal karena kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan anak menjadi lebih pendek jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Pengukuran *stunting* dilakukan dengan membandingkan panjang atau tinggi badan anak terhadap usianya. Penyebab *stunting* bersifat kompleks, dengan berbagai faktor yang saling mempengaruhi dan dapat berbeda antar daerah (Saputri & Tumangger, 2019).

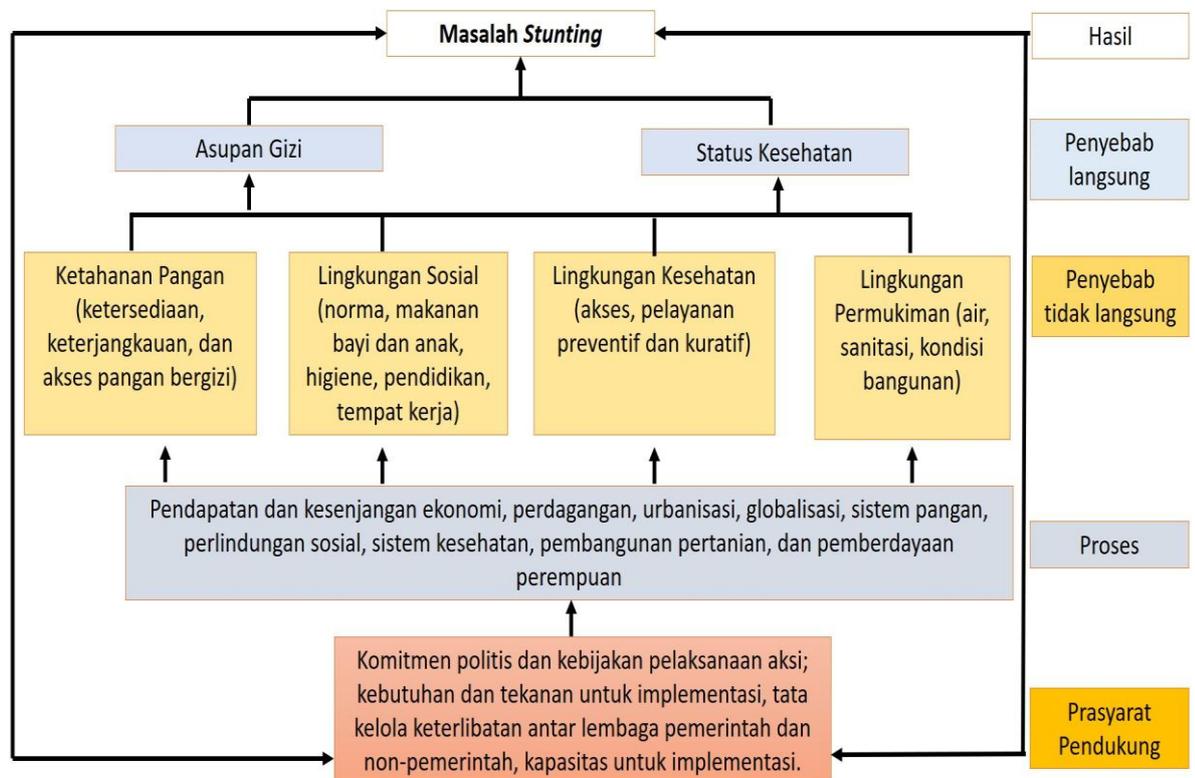
Stunting juga dipandang sebagai bentuk masalah kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka panjang. Kekurangan asupan nutrisi yang berkepanjangan ini mengganggu perkembangan fisik maupun kognitif anak, sehingga anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal (Kemenkes RI, 2018).

Menurut Anwar, Khomsan, dan Mauludyani (2014), *stunting* didefinisikan sebagai kondisi di mana status gizi anak, yang diukur melalui perbandingan tinggi badan terhadap usia (dengan nilai Z-Score kurang dari -2 SD), menunjukkan kegagalan pertumbuhan yang mengakibatkan tubuh menjadi pendek. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kematian serta berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan perkembangan motorik, berbahasa, dan ketidakseimbangan fungsional.

Lebih lanjut, stunting merupakan masalah kegagalan tumbuh yang dialami oleh anak di bawah usia lima tahun akibat kurang gizi sejak dalam kandungan hingga awal kehidupan, dengan tanda-tanda yang mulai tampak ketika bayi mencapai usia dua tahun (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017). Schmidt (2014) menekankan bahwa stunting muncul akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, sehingga pertumbuhan tinggi badan anak tidak memenuhi standar untuk usianya.

Pandangan umum yang menyatakan bahwa tinggi badan anak semata-mata ditentukan oleh faktor genetik dan bersifat ireversibel adalah kurang tepat. Faktanya, stunting merupakan manifestasi dari kekurangan asupan nutrisi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, stunting sebenarnya dapat diintervensi melalui pemenuhan nutrisi yang adekuat, terutama selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan.

bagan 7. Alur Penyebab Masalah stunting



Sumber: UNICEF 1997; IFPRI, 2016; BAPPENAS 2018, disesuaikan dengan konteks Indonesia

2.3.2 Prevalensi Stunting

Prevalensi adalah konsep statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyakit dalam populasi tertentu pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks kesehatan, istilah ini mengacu pada jumlah kasus dari suatu kondisi—dalam hal ini, stunting—yang ada dalam suatu populasi pada waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Pengukuran prevalensi stunting dilakukan dengan membandingkan tinggi badan anak dengan standar pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh WHO. Anak dianggap mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah standar yang sesuai untuk kelompok usia dan jenis kelaminnya, yang biasanya diukur menggunakan z-score. *Prevalensi stunting* kemudian dihitung sebagai persentase anak-anak dalam populasi yang diukur yang mengalami *stunting*. *Prevalensi stunting* merupakan indikator penting dari status gizi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat *prevalensi* yang tinggi menunjukkan adanya masalah gizi kronis yang serius dalam suatu populasi.

prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi dan menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya asupan gizi yang baik, kurangnya akses terhadap pangan bergizi, rendahnya pengetahuan tentang gizi pada ibu, serta faktor lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak.

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami *stunting* dalam pertumbuhan fisiknya. *Prevalensi balita stunting* digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.

Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius yang di hadapi Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, *prevalensi stunting* di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Walaupun

menurun, angka tersebut masih tinggi, mengingat target *prevalensi stunting* di tahun 2024 sebesar 14% dan standard WHO di bawah 20%.

Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya telah dimulai oleh pemerintah dengan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kemudian bupati Lampung selatan membuat inovasi kebijakan dengan dikeluarkannya instruksi Bupati No 2 Tahun 2020 tentang Program Swasembada Gizi, dan terbaru yaitu melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Gerakan Swasembada Gizi terhadap penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Lampung Selatan. Gerakan Swasembada Gizi diimplementasikan melalui strategi komprehensif, meliputi peningkatan cakupan program gizi, penguatan partisipasi masyarakat, edukasi gizi, akses pangan bergizi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka konseptual, implementasi kebijakan, dalam hal ini Gerakan Swasembada Gizi, dipengaruhi oleh empat variabel berdasarkan teori George C. Edward III:

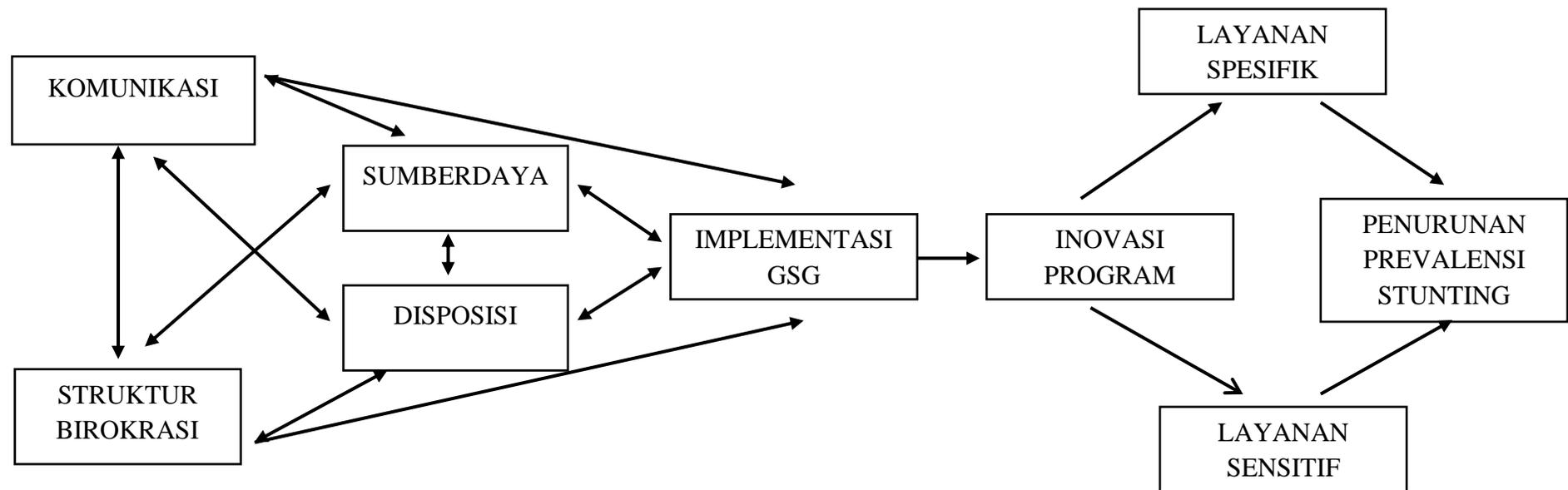
1. Komunikasi, Keberhasilan implementasi memerlukan implementor yang mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan agar dapat ditransmisikan ke kelompok sasaran, mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya, Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, implementasi tidak akan efektif jika implementor kekurangan sumber daya, seperti sumber daya manusia (kompetensi) dan finansial.
3. Disposisi, Watak dan karakteristik implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Perbedaan sikap antara implementor dan pembuat kebijakan dapat membuat implementasi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan, termasuk *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi, memiliki pengaruh signifikan. Struktur yang terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur yang rumit (*redtape*).

Faktor-faktor seperti gizi (asupan makanan, pola makan sehat), kesehatan (akses layanan kesehatan, sanitasi), dan sosial ekonomi (tingkat pendidikan, pendapatan) diidentifikasi sebagai variabel intervening atau moderasi yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan Gerakan Swasembada Gizi dan tingkat prevalensi stunting.

Gambar 8. Bagan Kerangka Pikir Implementasi Gerakan Swasembada Gizi



Sumber: diolah peneliti dari Teori Implementasi George C Edward III

III.METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang memberikan gambaran terkait masalah yang diteliti, dalam konteks penelitian ini untuk melihat bagaimanakah Implementasi Gerakan Swasembada Gizi dalam penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:7) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Satori dan Komariah (2014:83) memaparkan penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya.

Peneliti memilih metode tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena diharapkan dengan metode ini dapat memperoleh gambaran mengenai analisis terhadap saja yang menjadi factor pendorong inovasi kebijakan serta Bagaimana inovasi kebijakan dapat berjalan efektif, lebih lanjut penelitian ini juga diharapkan untuk dapat mengoptimisasi Bagaimana inovasi kebijakan dapat berjalan efektif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus

penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya (a) komunikasi; (b) sumber daya; (c) disposisi; (d) struktur birokrasi pelaksana, dalam implementasi Gerakan swasembada gizi di Lampung Selatan.

3.3 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama meliputi kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan dapat berupa dokumen dan materi lainnya. Berdasarkan asal data, pengumpulan informasi dilakukan melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer menyediakan data secara langsung kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder menyampaikan informasi secara tidak langsung, misalnya melalui wawancara dengan pihak lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara, serta melalui observasi langsung. Dalam menentukan informan, penulis menerapkan teknik *stratified* sampling yang dilakukan melalui proses wawancara. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Hardani et Al, 2020). Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan sejumlah informan. Penentuan informan dilakukan

dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel data yang dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, misalnya melalui orang lain atau dokumen, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019). Data jenis ini biasanya mudah diakses. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup literatur, artikel jurnal, serta situs-situs di internet yang relevan dengan topik penelitian. Selain data primer, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa dokumen-dokumen dari OPD-OPD yang berkaitan dengan Gerakan swasembada Gizi di Kabupaten Lampung Selatan.

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Lampung Selatan secara *purposiv*. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki isu ataupun fenomena masalah penelitian yang memiliki relevansi dengan bidang studi yang tengah peneliti jalankan saat ini yaitu implementasi Gerakan swasembada gizi dalam Penurunan Prevalensi Stunting. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

3.5 Informan

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Pada dasarnya diambil dari kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian ini merupakan sumber yang memberikan informasi tentang data atau hal-hal yang diperlukan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilaksanakan subjek dalam peneliti ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga.

Menurut Moleong and Lexy (2017) informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Maka teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini penulis memilih informan yaitu instansi atau pihak yang dianggap terlibat dalam pelaksanaan gerakan swasembada gizi Kabupaten Lampung Selatan baik sebagai pembuat kebijakan, pelaksana dan penerima manfaat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Instansi	Jabatan	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Bidang bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Informan Utama-1
2.	Bappeda	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	Informan Utama-2
3.	PMD	Sekretaris	Informan Utama-3
4.	DALDUK KB	Kepala Dinas	Informan Utama-4
5.	DALDUK KB	Kabid Penggerakan	Informan Utama-5
6.	DALDUK KB	Penyuluh KB Kec. Jati Agung/ Kader	Informan Utama-6
7.	DALDUK KB	Penyuluh KB Kecamatan Natar/ Kader	Informan Utama-7
8.	Masyarakat	Fasilitator Program	Informan Utama-8
9.	Masyarakat	Kec. Jati Agung	Informan Triangulasi-1
10.	Masyarakat	Kec. Jati Agung	Informan Triangulasi-2
11.	Masyarakat	Kec. Jati Agung	Informan Triangulasi-3
12.	Masyarakat	Kec. Natar	Informan Triangulasi-4
13.	Masyarakat	Kec. Natar	Informan Triangulasi-5
14.	Masyarakat	Kec. Natar	Informan Triangulasi-6

Sumber: diolah peneliti berdasarkan rencana penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis data sekunder yang disimpan dalam bentuk file atau dokumen. Data ini bisa berupa catatan yang dibuat secara konvensional maupun dalam format elektronik, seperti tulisan, buku, laporan, majalah, notulen rapat, surat kabar, dan sebagainya (Suharso, 2009:65). Dokumentasi biasa digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih dipercaya atau menjadi faktor pendukung dalam melakukan penelitian. Dokumentasi diperlukan ketika sedang melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data melalui dokumentasi antara lain meliputi dokumen kebijakan dan implementasi program terkait Gerakan Swasembada Gizi dari instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan maupun data-data riset Kesehatan dan statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3.6.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden berupa data yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana sebelumnya dibuat panduan untuk mengarahkan topik bahasan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian namun dapat dikembangkan lebih jauh dan tidak dilaksanakan dengan urutan yang kaku

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada informan utama (8 orang) dan informan triangulasi (6 orang).

3.6.3 Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti (Hadi, 2014:21). Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode observasi partisipan, di mana

periset tidak hanya mengamati tetapi juga berperan sebagai anggota kelompok yang diteliti, baik dengan diketahui maupun tidak oleh kelompok tersebut. Secara khusus, jenis observasi partisipan yang digunakan adalah partisipan-peneliti, yaitu periset yang merupakan bagian dari kelompok yang diamati dan melakukan pengamatan dari dalam kelompok itu sendiri (Kriyantono, 2014:63). Dalam hal ini, observasi dilakukan pada saat penyuluhan petugas posyandu kepada orang tua dari anak yang mengalami stunting di Posyandu “Rahayu” (dusun 1 dan 5, Desa Marogdadi, Kecamatan Jati Agung) dan Pertemuan rutin kader/ Penyuluh KB dan kader Posyandu di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Emzir, 2010:48).

Reduksi data adalah tahap penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan merangkum data mentah yang seringkali berlimpah, beragam, dan kompleks. Proses ini melibatkan pemilihan poin-poin kunci dan hal-hal penting dari laporan atau catatan terperinci.

Data yang sudah diringkas dan disaring berdasarkan konsep, tema, atau kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai

hasil observasi, serta mempermudah peneliti untuk meninjau kembali data sebelumnya jika diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya adalah menemukan temuan baru. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang tampak asing, tidak dikenal, atau belum memiliki pola, hal tersebut justru harus menjadi fokus utama dalam proses reduksi data.

Reduksi data adalah proses berpikir yang sensitif dan membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi. Penting bagi peneliti untuk berdiskusi dengan pihak lain yang ahli atau dapat memberikan wawasan baru guna memperluas pemahaman. Diharapkan, proses reduksi data ini mampu mengidentifikasi data-data yang mengandung temuan signifikan dan berpotensi mengembangkan teori.

3.7.2 Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya (Emzir, 2010:50).

3.7.3 Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif sering kali mengandalkan triangulasi untuk memastikan kredibilitas data. Teknik ini populer karena memungkinkan cross-check data dari berbagai sumber atau metode, sehingga mengurangi bias peneliti. Istilah "triangulasi" sendiri berasal dari navigasi yang menggunakan setidaknya tiga titik referensi untuk menentukan posisi geografis.

Denzin, seperti dikutip oleh Sarosa (2021:95-96), awalnya mendefinisikan triangulasi sebagai penggunaan berbagai metodologi untuk meneliti fenomena yang sama. Tujuannya adalah untuk mengurangi bias pribadi peneliti yang mungkin timbul jika hanya menggunakan satu metodologi. Denzin kemudian mengidentifikasi beberapa jenis triangulasi:

- a. Triangulasi data: Mengumpulkan dan menggunakan data dari berbagai sumber berbeda.

- b. Triangulasi peneliti: Mengumpulkan data melalui orang lain selain peneliti utama.
- c. Triangulasi teori: Menggunakan lebih dari satu teori dalam menyusun kerangka teoritis.
- d. Triangulasi metode: Meliputi dua bentuk:
 - 1) Triangulasi dalam metode: Menggunakan cara berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
 - 2) Triangulasi antar metode: Menggunakan beberapa alat berbeda pada sumber data yang sama.

Sejalan dengan Denzin, Satori dan Komariah (2020:212) mendefinisikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan pada berbagai waktu. Mereka mengklasifikasikan triangulasi menjadi tiga jenis:

- a. Triangulasi sumber: Mengumpulkan data dari beragam sumber yang saling terkait.
- b. Triangulasi teknik: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data pada sumber data yang sama.
- c. Triangulasi waktu: Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

Dengan menerapkan triangulasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat terhadap fenomena yang diteliti, karena data divalidasi dari berbagai perspektif.

3.7.4 Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Emzir, 2010:54).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Implementasi Gerakan Swasembada Gizi (GSG) di Kabupaten Lampung dalam upaya penurunan stunting, menggunakan Konsep Implementasi Kebijakan George Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasilnya menunjukkan penurunan prevalensi stunting yang signifikan di Lampung Selatan, dari 43% (2013) menjadi 10,30% (2023), melampaui target nasional. Keberhasilan ini didukung oleh komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat; sumber daya yang beragam termasuk alokasi anggaran APBN, APBD, Dana Desa, serta ketersediaan kader terlatih dan fasilitas berbasis komunitas (Posyandu, Taman Gizi Desa); disposisi positif dari pimpinan daerah, pelaksana, dan masyarakat yang ditunjukkan melalui komitmen dan partisipasi aktif; serta struktur birokrasi yang terkoordinasi melalui tim pengendali multi-tingkat dan regulasi yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen politik yang kuat, pembelajaran adaptif, dan pelibatan multi-stakeholder merupakan faktor kunci keberhasilan Gerakan Swasembada Gizi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Upaya komunikasi sangat masif dan beragam, melibatkan *roadshow*, media daring dan cetak, serta peran Duta Swasembada Gizi dan kader lapangan. Informasi tujuan program secara umum telah dipahami baik oleh dinas terkait maupun masyarakat, termasuk kaitannya dengan pencegahan stunting. Namun, terdapat sedikit perbedaan penekanan prioritas di tingkat yang berbeda, dan aspek teknis budidaya masih kurang jelas bagi sebagian masyarakat. Konsistensi penyuluhan dari dinas masih belum terlalu sering,

dan terdapat tantangan dalam mempertahankan antusiasme masyarakat setelah bantuan awal habis atau menghadapi kegagalan panen.

2. Sumber Daya

Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan sumber daya manusia (tenaga penyuluh dan kader), finansial (APBD, Dana Desa, dan bantuan pihak lain), wewenang (Instruksi Bupati), dan fasilitas (bibit, alat pertanian, taman edukasi) untuk mendukung GSG. Namun, ketersediaan anggaran APBD masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau semua keluarga yang membutuhkan, serta sering terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Jumlah bibit dan materi sosialisasi yang diterima kader juga dirasa belum mencukupi kebutuhan masyarakat secara luas. Pelatihan bagi SDM telah dilakukan dan dianggap bermanfaat, meskipun ada kebutuhan untuk pelatihan praktis lebih lanjut terutama dalam mengatasi masalah hama.

3. Disposisi

Komitmen dan motivasi pelaksana program sangat tinggi, terutama didorong oleh kepemimpinan Bupati yang kuat dan partisipasi aktif para kader. Dinas terkait dan kader memiliki disposisi yang sangat positif, melihat program ini sebagai pengabdian dan solusi nyata untuk penurunan stunting. Masyarakat penerima manfaat juga menunjukkan disposisi positif, merasa program ini bermanfaat secara ekonomi (hemat biaya belanja) dan kesehatan (pemuhan gizi keluarga), bahkan bertekad melanjutkannya secara mandiri meskipun tanpa bantuan pemerintah. Insentif non-finansial seperti penghargaan dan apresiasi dianggap cukup efektif dalam memotivasi pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat struktur organisasi yang jelas dengan pembentukan Tim Pengendali GSG di berbagai tingkatan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi yang berjenjang. Koordinasi antar dinas terkait telah terjalin di tingkat pimpinan, dan kader memiliki jalur komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan Puskesmas. Namun, hambatan birokrasi utama adalah

belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) program yang terintegrasi, yang dapat menyebabkan sinkronisasi program dan data yang belum optimal di tingkat operasional. Proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu juga menjadi kendala yang menunda distribusi bantuan. Upaya penyinkronan data stunting dengan data swasembada gizi masih menjadi PR untuk melihat korelasi dampak riil.

Secara keseluruhan, Gerakan Swasembada Gizi di Lampung Selatan memiliki fondasi yang kuat berkat komitmen kepemimpinan dan disposisi positif pelaksana di lapangan. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal dalam penurunan stunting, perlu perbaikan signifikan pada aspek struktur birokrasi, khususnya melalui standardisasi prosedur dan integrasi data, serta peningkatan alokasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi Gerakan Swasembada Gizi di Kabupaten Lampung Selatan:

1. Peningkatan Kejelasan dan Konsistensi Komunikasi
 - a. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) program GSG yang terintegrasi dan mudah dipahami oleh semua pihak terlibat, dari dinas hingga kader dan masyarakat. SOP ini harus mencakup aspek teknis budidaya dan penanganan masalah umum seperti hama.
 - b. Meningkatkan frekuensi dan kualitas penyuluhan teknis budidaya di tingkat desa, mungkin melalui "klinik" rutin atau demplot yang lebih intensif, untuk mengatasi kendala praktis yang dihadapi masyarakat.
 - c. Mengembangkan strategi komunikasi yang lebih spesifik untuk mengatasi kendala motivasi dan stigma di masyarakat, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat atau mengadakan kunjungan personal yang lebih sering.

2. Optimalisasi Sumber Daya

- a. Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dari APBD, APBN, atau sumber lain yang lebih stabil dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, dengan fokus pada keberlanjutan program.
- b. Mempercepat proses pencairan anggaran dan distribusi bibit serta alat pertanian agar sesuai dengan musim tanam dan kebutuhan masyarakat.
- c. Menyediakan variasi bibit yang lebih banyak dan sesuai dengan preferensi serta kondisi lahan masyarakat setempat.
- d. Meningkatkan kapasitas kader dan penyuluh dengan pelatihan praktis yang lebih mendalam, terutama tentang penanganan hama dan penyakit tanaman secara organik, serta teknik budidaya di lahan terbatas.

3. Mempertahankan dan Memperkuat Disposisi

- a. Terus memberikan apresiasi dan motivasi non-finansial kepada kader dan kelompok masyarakat yang aktif dan berhasil, seperti penghargaan, studi banding, atau publikasi keberhasilan.
- b. Memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan program di tingkat masyarakat melalui pembentukan kelompok swasembada gizi yang mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada program pemerintah.

4. Perbaiki Struktur Birokrasi

Mendesak percepatan penyusunan dan implementasi SOP program GSG yang terintegrasi lintas sektor untuk mengurangi "ego sektoral" dan memastikan sinkronisasi program dan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- a. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring data stunting yang terintegrasi dengan data pelaksanaan GSG, sehingga dapat dengan mudah melihat korelasi dan dampak riil program terhadap penurunan stunting di tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui platform digital yang memungkinkan real-time monitoring.
- b. Menyederhanakan prosedur birokrasi, terutama dalam pengadaan dan distribusi bantuan, untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan di lapangan.

- c. Mengadakan rapat koordinasi teknis di lapangan secara lebih sering untuk mengatasi kendala operasional dan sinkronisasi jadwal kegiatan antar OPD.

Dengan memperhatikan saran-saran ini, diharapkan implementasi Gerakan Swasembada Gizi di Kabupaten Lampung Selatan dapat semakin efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kemandirian gizi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rohman, LA Purwastuti. (2014) *Epistemologi dan Logika: Filsafat untuk Pengembangan Pendidikan*. CV. Aswaja Pressindo.
- AB Widyanta. 2002. *Problem Modernitas Dalam Kerangka*. Cielaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
- Agustino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Allen. D.E. 1980. *Social Psychology as Social Process*. Wadworth Inc : California.
- Anwar, F., Khomsan, A., & Mauludyani, A 2014, Masalah dan Solusi Stunting Akibat Kurang Gizi di Wilayah Pedesaan, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2022). *Berita Resmi Statistik Nomor 07/01/18/Th.XVI, 17 Januari 2022*. Diakses dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (bps.go.id). Pada Tanggal 11 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.
- Charles, W., dan Schmidt. 2014. Beyond Malnutrition, The Role of Sanitation in Stunted Growth. *Environmental Health Perpevtives*, 122(11): 298-303.
- Cohen. J Bruce. 1983. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Della Porta, Donatella and Mario Diani. 1999. *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet 10*. Balai Pustaka, Jakarta
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Evert M. Rogers (Suwarno, 2008:9). Pengertian Inovasi. Tersedia di : <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-inovasi-menurut-parahli-dan-contohnya>

- Imanda, Raisa. N. (2016). *Strategi Peningkatan Quality of Urban Life (QoUL) dengan Pertimbangan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kota Tempat Tinggal*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016.
- Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta.
- J. Moleong, Lexy. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Joko Widodo. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Joko Widodo. (2008) *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Siduarjo
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003)
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak. Vol. 8. Jakarta; 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi. Jakarta; 2019.
- Kuppuswamy, B. 1979. *Elements of Social Psychology*. New Delhi : Vikas Publishing Hous PVT Ltd.
- Locer. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Pearson Education Inc. Upper Sadle River.
- Michener. 1999. *Social Psychology*. Fortworth: Harcourt Brace College Publ.
- Mohammad, Syawaludin. 2017. *Sosiologi perlawanan, studi perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*. Deepublish, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Mulyadi, 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Nasution, M. Nur. 2004. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, 2011. *Public Policy. Edisi Ketiga, Revisi*. PT Elex Media Kompotindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Rahman, Hardiyanto, Mutia Rahmah, Nur Saribulan. 2023. *Upaya Penanganan Stunting di Indonesia – Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa

- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.
- Said Zainal Abidin. (2012). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Subarsono. 2011. *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta : PT. Indeks.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing, Malang
- Tarrow, Sidney. 1998. *Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*). Vol. 1. Jakarta; 2017.
- Triana, 2011. *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Fisip Universitas Airlangga, Surabaya.
- Wibawa, samodra. 1994. *Kebijakan publik: proses dan analisis*. Intermedia. Jakarta.
- Widyanta, AB. 2002. *Problem Modernitas Dalam Kerangka. Cinelaras Pustaka Rakyat Cerdas*. Yogyakarta.
- Winardi. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta, hlm 174
- Winarno, budi. 2002. *Teori dan proses kebijakan publik*. Media pressindo. Yogyakarta.
- Indonesia Accelerates Fight Against Childhood Stunting - World Bank, diakses April 10, 2025, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/06/26/indonesia-fights-stunting-commitment-convergence-and-communities>
- Community-Based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project - Millennium Challenge Corporation, diakses April 10, 2025,

<https://www.mcc.gov/publications-sections/section-ind-star-report-health-project/>

stunting.go.id, diakses April 10, 2025, <https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2021/09/SWASEMBADA-GIZI-INOVASI-PEMBELAJARAN-rev-4.pdf>

Gerakan Swasembada Gizi Upaya Pencegahan dan ..., diakses April 10, 2025, <https://stunting.go.id/gerakan-swasembada-gizi-upaya-pencegahan-dan-penanggulangan-stunting-dengan-mendorong-peningkatan-kualitas-pelayanan-pemerintah-daerah-partisipasi-masyarakat-dalam-pemenuhan-gizi-secara-mandiri-dan-be/>

Success stories with reducing stunting: Lessons for PNG - World Bank Documents and Reports, diakses April 10, 2025, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/809771561531103886/pdf/Success-Stories-with-Reducing-Stunting-Lessons-for-PNG.pdf>

Pemkab Lampung Selatan Tegaskan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting Lewat Aksi Rembuk 2025 - clickinfo.co.id, diakses April 10, 2025, <https://clickinfo.co.id/detailpost/pemkab-lampung-selatan-tegaskan-komitmen-percepatan-penurunan-stunting-lewat-aksi-rembuk-2025>

What Is Stunting and Why It Matters | Stunting in Indonesia | Stunting ..., diakses Mei 10, 2025, <https://www.tanotofoundation.org/en/news/what-is-stunting-and-why-it-matters/>

Stunting in Indonesia: A Critique of Agricultural Homogenization ..., diakses Mei 10, 2025, <https://sites.bu.edu/pardeeatlas/advancing-human-progress-initiative/stunting-in-indonesia-a-critique-of-agricultural-homogenization/>

Ketua TP PKK Pesisir Barat kunjungi sekretariat swasembada gizi Lampung Selatan, diakses Mei 10, 2025, <https://lampung.antaranews.com/berita/666231/ketua-tp-pkk-pesisir-barat-kunjungi-sekretariat-swasembada-gizi-lampung-selatan>

(PDF) Handling Stunting in Indonesia: Challenges, Progress and ..., diakses Mei 10, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377943074_Handling_Stunting_in_Indonesia_Challenges_Progress_and_Recommendations

Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas, diakses Mei 10, 2025, <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/5272/1/Tantangan>

%20Implementasi%20Konvergensi%20pada%20Program%20Pencegahan%20Stunting%20di%20Kabupaten%20Prioritas.pdf

Fact sheets - Malnutrition, diakses Mei 10, 2025, <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/malnutrition>

strategi nasional penurunan stunting, pemerintah daerah bisa apa? - BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, diakses Mei 10, 2025, https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/01/TH_STUNTING_Rev.Ksb_Rev-Tim-20231218.pdf

Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework | Request PDF - ResearchGate, diakses Mei 10, 2025, https://www.researchgate.net/publication/346048170_Policy_Implementation_Analysis_Exploration_of_George_Edward_III_Marilee_S_Grindle_and_Mazmanian_and_Sabatier_Theories_in_the_Policy_Analysis_Triangle_Framework

Daftar Kabupaten di Lampung dengan Prevalensi Balita Stunting Tertinggi 2021 - Databoks, diakses Mei 10, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/30d11fe8aec2dc8/daftar-kabupaten-di-lampung-dengan-prevalensi-balita-stunting-tertinggi-2021>

SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8% - Sehat Negeriku, diakses Mei 10, 2025, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20250526/2247848/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/>

Tim Bappenas apresiasi program swasembada gizi dalam upaya ..., diakses Mei 10, 2025, <https://lampung.antaranews.com/berita/566385/tim-bappenas-apresiasi-program-swasembada-gizi-dalam-upaya-penurunan-stunting>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ... - Jurnal UWP, diakses Mei 10, 2025, <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/download/211/155>

Country Nutrition Profiles - Global Nutrition Report, diakses Mei 10, 2025, <https://globalnutritionreport.org/nutrition-profiles/>

Buku Kebijakan Dan Strategi Percepatan ... - E-Learning BKKBN, diakses Mei 10, 2025, https://lms-elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18037/mod_resource/content/1/4.%20Buku%20Kebijakan%20Dan%20Strategi%20Percepatan%20Penurunan%20Stunting%20Di%20Indonesia.pdf

kepolisian resort lampung selatan menggelar program makan bergizi gratis di sekolah dasar negeri 2 way lubuk, diakses Mei 10, 2025, <https://lampung.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/Caber-Makan-Bergizi-Gratis.pdf>

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, diakses Mei 10, 2025, https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20250213110739-2025-02-13data_karya_ilmiah110738.pdf

GERAKAN SWASEMBADA GIZI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, diakses Mei 10, 2025, <https://lampungselatankab.go.id/web/2021/09/08/gerakan-swasembada-gizi-kabupaten-lampung-selatan>

Lampung Province: To Build Multi Stakeholder Partnership to Address Stunting - uclg aspac, diakses Mei 10, 2025, <https://uclg-aspac.org/lampung-province-to-build-multi-stakeholder-partnership-to-address-4/>

Peran Desa/ Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi - Peraturan BPK, diakses Mei 10, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280765/perbup-kab-lampung-selatan-no-16-tahun-2023>

Target 2024 Zero Stunting, Pemkab Lampung Selatan Bersama Stakeholder Terkait Satukan Komitmen Melalui Rembuk Stunting, diakses Mei 10, 2025, <https://www.lampungselatankab.go.id/web/2023/03/02/target-2024-zero-stunting-pemkab-lampung-selatan-bersama-stakeholder-terkait-satukan-komitmen-melalui-rembuk-stunting/>

GERAKAN SWASEMBADA GIZI - Tim Percepatan Penurunan Stunting, diakses Mei 10, 2025, <https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2021/09/SWASEMBADA-GIZI-INOVASI-PEMBELAJARAN-rev-4.pdf>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN LORE TENGAH KABUPATEN POSO - Semantic Scholar, diakses Mei 10, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/e11d/209751364815955aab2b9b796ed9c6b35589.pdf>

Gerakan Swasembada Gizi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dengan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Gizi secara Mandiri dan Berkelanjutan: Praktik Baik Kabupaten Lampung

Selatan, diakses Mei 10, 2025, <https://stunting.go.id/gerakan-swasembada-gizi-upaya-pencegahan-dan-penanggulangan-stunting-dengan-mendorong-peningkatan-kualitas-pelayanan-pemerintah-daerah-partisipasi-masyarakat-dalam-pemenuhan-gizi-secara-mandiri-dan-be/>

Bappenas Apresiasi Inovasi Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pengentasan Stunting, diakses Mei 10, 2025, <https://www.lampungselatankab.go.id/web/2022/11/23/bappenas-apresiasi-inovasi-kabupaten-lampung-selatan-dalam-pengentasan-stunting/>

Regulasi Stunting di Pusat dan Daerah | Pemerintah Kabupaten Banyumas, diakses Mei 10, 2025, <http://bappedalitbang.banyumaskab.go.id/page/42861/regulasi-stunting>

Tim Percepatan Penurunan Stunting Lampung Selatan, Selenggarakan Road Show Program Swasembada Gizi Dan Penguatan Kapasitas Di 17 Kecamatan, Merbau Mataram Menjadi Tuan Rumah Di Hari Ke Dua, diakses Mei 10, 2025, <https://www.lampungselatankab.go.id/web/2022/07/12/tim-percepatan-penurunan-stunting-lampung-selatan-selenggarakan-road-show-program-swasembada-gizi-dan-penguatan-kapasitas-di-17-kecamatan-merbau-mataram-menjadi-tuan-rumah-di-hari-ke-dua/>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG Oleh - E Journal Undip, diakses Mei 10, 2025, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/44927/31347>

Executive Summary - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diakses Mei 10, 2025, https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/07/0d4e0a389be24145a80bf712dbdcf92e_DESAIN_LPEFD_XXXVIII_MEI_2023_.pdf-1.pdf

Kabupaten Lampung Selatan Kembali Raih Penghargaan Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 - Saibumi.com, diakses Mei 10, 2025, <https://www.saibumi.com/artikel-127069-kabupaten-lampung-selatan-kembali-raih-penghargaan-dalam-percepatan-penurunan-stunting-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2024-.html>

PERBUP Kab. Lampung Selatan No. 15 Tahun 2023 - Peraturan BPK, diakses Mei 10, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280783/perbup-kab-lampung-selatan-no-15-tahun-2023>

Peraturan Perundangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Gerakan Swasembada Gizi
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026
- Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung
- Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/477/Bangda tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/179/VI.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Lampung Tahun 2024-2026
- Buku Saku Kader Pintar Cegah Stunting yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021
- Buku Saku Indonesia Sehat Bebas Stunting yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020
- Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024